

## Edisi Istimewa untuk Kemerdekaan!

Timor Lorosa'e setelah UNTAET – Lihat halaman 8.

Dengan *Buletin La'ó Hamutuk* edisi ini, kami menyoroti beberapa masalah yang paling penting dan paling sulit yang akan harus diatasi Timor Lorosa'e yang baru merdeka. Selain artikel utama dan editorial tentang cadangan minyak dan gas di Laut Timor, kami juga menguraikan secara ringkas tugas-tugas yang dihadapi negara baru ini, dengan sorotan lebih rinci pada masalah pengungsi dan keadilan, dua bidang yang masih menjadi tanggungjawab masyarakat internasional. Kami juga melaporkan tentang pertukaran yang baru-baru ini diselenggarakan *La'ó Hamutuk* dengan dua pendidik dari Nicaragua tentang gender, kekuasaan, dan kekerasan. Artikel yang lain, bagian dari investigasi lanjutan kami tentang donor, menyoroti bantuan bilateral Cina kepada Timor Lorosa'e. Terakhir, editorial halaman terakhir melihat kendala-kendala yang ditimbulkan negara-negara donor pada pemerintah Timor Lorosa'e merdeka, dan mempertanyakan apakah fasilitas keuangan yang dikelola Bank Dunia akan memungkinkan kemerdekaan sejati.

## Dengan Kemerdekaan, Apa Yang Berubah Bagi Celah Timor? Perbatasan dan Perjanjian Minyak Antara Australia dan Timor Lorosa'e

Pendapatan dari minyak dan gas alam sekarang ini memberikan harapan yang paling besar bagi Timor Lorosa'e untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bangsa ini pada masa mendatang. Meskipun sejumlah kecil kandungan minyak dan gas alam terdapat di daratan Timor Lorosa'e, pembahasan sekarang hanya terpusat pada cadangan minyak dan gas alam yang besar yang ada di bawah laut antara Timor Lorosa'e dan Australia. Cadangan minyak dan gas alam ini bernilai antara US\$ 8 milyar sampai US\$ 38 milyar untuk Timor Lorosa'e sampai 30 tahun mendatang. (Anggaran pemerintah Timor Lorosa'e untuk tahun yang akan datang besarnya US\$ 77 juta).

Dewasa ini, Timor Lorosa'e dan Australia sedang merundingkan sebuah perjanjian mengenai pengembangan minyak

bersama di Celah Timor, sebuah wilayah yang sebelumnya menjadi obyek sebuah perjanjian antara Australia dan Indonesia. Persoalan apakah bagian untuk Timor Lorosa'e mendekati US\$ 8 milyar atau US\$ 38 milyar sangat tergantung pada garis batas Laut Timor. Sejumlah pakar mengatakan bahwa jika batas perairan (dasar laut) dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional, Timor Lorosa'e akan memperoleh keuntungan lebih dari US\$ 30 milyar. Masalah batas perairan laut antara Australia dan Timor Lorosa'e itu bukan hal yang baru, tetapi kemerdekaan Timor Lorosa'e memberikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang baru.

Banyak yang menduga bahwa segera setelah Timor Lorosa'e resmi merdeka, Perdana Menteri Timor Lorosa'e

*(Bersambung ke halaman 2)*



### Di dalam . . .

PetroTimor: Sejarah Kuno? .....	4
Editorial: Australia: Berhenti Mencuri Minyak Timor Leste .....	7
Timor Lorosa'e Menghadapi Tantangan Pasca UNTAET .....	8
Keadilan Masih Tertunda .....	12
55.000 Orang Timor Lorosa'e Masih Tertahan di Indonesia .....	14
Apa dibalik Bantuan Cina untuk Timor Lorosa'e? .....	16
Pertukaran bersama Aktivis dari Nicaragua .....	17
Berita Singkat .....	18
Editorial: Kemerdekaan Keuangan .....	20

yang baru, Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia akan menandatangani “Perjanjian Laut Timor” yang telah dibahas oleh pemerintah Australia dan UNTAET/Timor Lorosa’e pada tahun 2001. Kesepakatan ini kemudian akan dibawa ke Parlemen Timor Lorosa’e yang baru untuk diratifikasi menjadi sebuah perjanjian mengenai kandungan Laut Timor itu. Para pendukungnya menyebut perjanjian ini “perolehan terbaik” yang saat ini bisa didapat Timor Lorosa’e dari Australia, dan dengan cepat menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan satu perjanjian sementara “tampa merugikan batas perairan Timor Lorosa’e”, yang berarti bahwa perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penentuan keputusan di masa mendatang mengenai batas perairan. Namun, yang lain berpendapat bahwa perjanjian ini akan melumpuhkan kemampuan Timor Lorosa’e untuk menuntut batas yang lebih luas dan dengan demikian melumpuhkan kemampuannya untuk memperoleh akses atas semua kandungan di dasar laut yang menurut hukum merupakan hak negara ini.

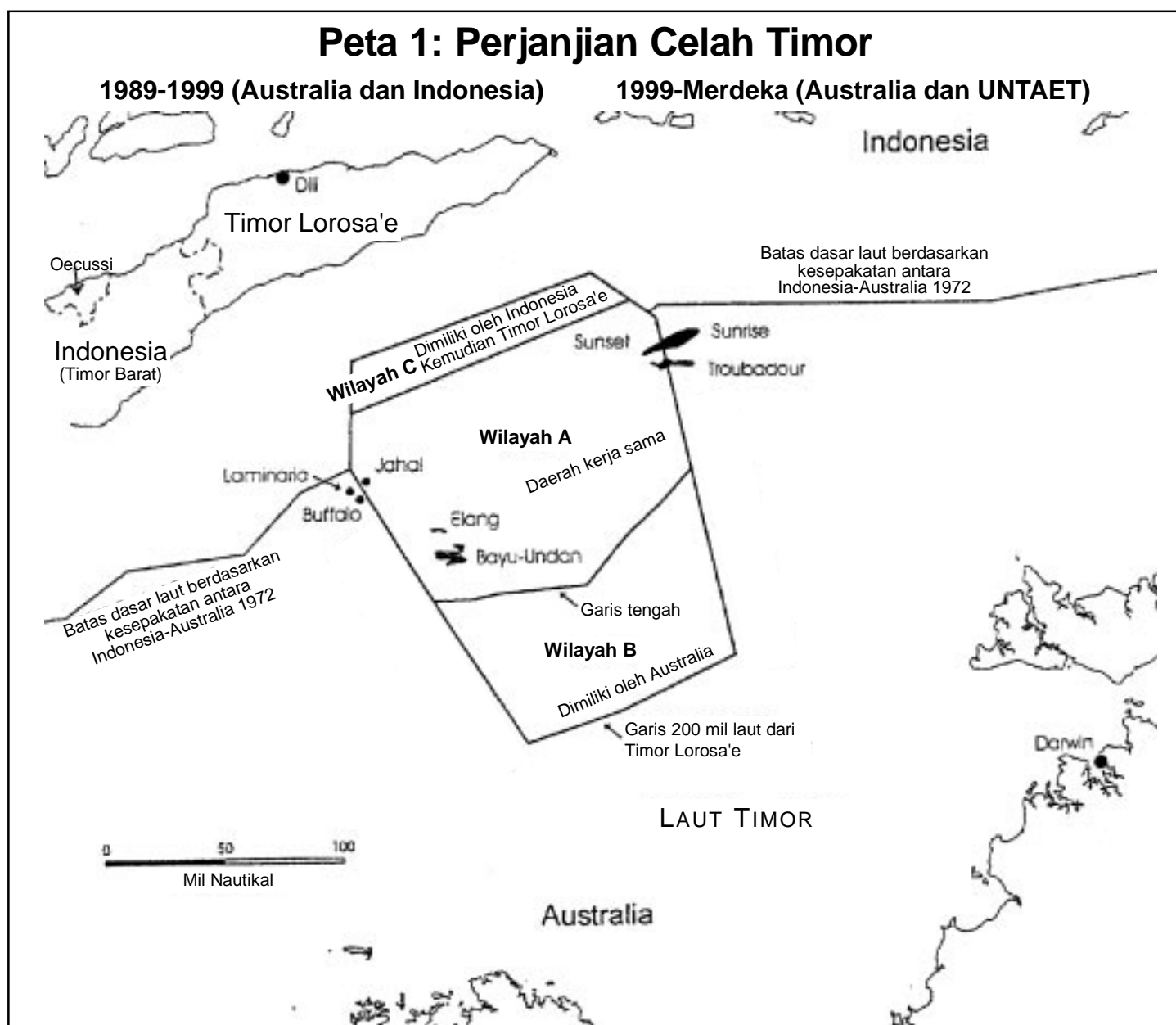
*La’o Hamutuk* telah menulis dua editorial mengenai perundingan Celah Timor (lihat *Buletin La’o Hamutuk* Vol. 1, No. 3 dan Vol. 2, No. 5). Dalam artikel ini, kami menyajikan informasi mengenai permasalahan batas perairan dan perjanjian yang diusulkan. Kami juga berharap mendorong transparansi dan dialog seputar masalah penting ini, yang

kurang dipahami oleh sebagian besar rakyat Timor Lorosa’e. *Buletin La’o Hamutuk* nomor-nomor terbitan yang akan datang akan mengupas aspek-aspek lain sumber alam minyak dan gas Timor Lorosa’e, mencakup proyek-proyek eksplorasi yang sedang berlangsung saat ini, keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak, masalah tenaga kerja dan lingkungan hidup, serta konteks global eksploitasi minyak dan gas.

### Batas Wilayah Perairan antara Timor Lorosa’e dan Australia

Saat kemerdekaan, Timor Lorosa’e belum memiliki batas perairan yang pasti dan harus mengupayakan perjanjian batas perairan dengan Indonesia dan Australia. Batas perairan yang lama antara Australia dan Indonesia menjadi dasar bagi pembagian cadangan minyak dan gas sekarang ini di Laut Timor serta dalam perjanjian yang diusulkan. Untuk memahami di mana Timor Lorosa’e sekarang berpijak, penting untuk dilihat sejarah batas perairan antara kedua negara ini.

Pada tahun 1972, dengan menggunakan argumen landas kontinental (yang menyatakan bahwa dasar laut harus mengikuti titik terdalam pada dasar laut antar negara), Australia berhasil merundingkan dengan Indonesia batas perairan yang memberikan Australia 85% wilayah perairan antara dua



negara. Portugal tidak pernah menerima argumentasi landas kontinental dan tidak berhasil mendapat batas yang terletak pada garis tengah antara garis pesisir Australia dan Timor Lorosa'e. Wilayah yang diperebutkan itu kemudian dikenal sebagai "Celah Timor."

Pada tahun 1975, dengan mengetahui sepenuhnya niat Indonesia untuk menginvasi Timor Lorosa'e, Duta Besar Australia untuk Jakarta Richard Woolcott mengirimkan memo rahasia kepada pemerintahnya, yang mengatakan bahwa "menutup celah yang ada sekarang dalam batas laut yang disepakati dapat lebih mudah dirundingkan dengan Indonesia ... dibandingkan dengan Portugal atau Timor Portugis yang merdeka." Dia menulis dalam memo itu bahwa Menteri Pertambangan dan Energi mungkin tertarik dengan hal ini.

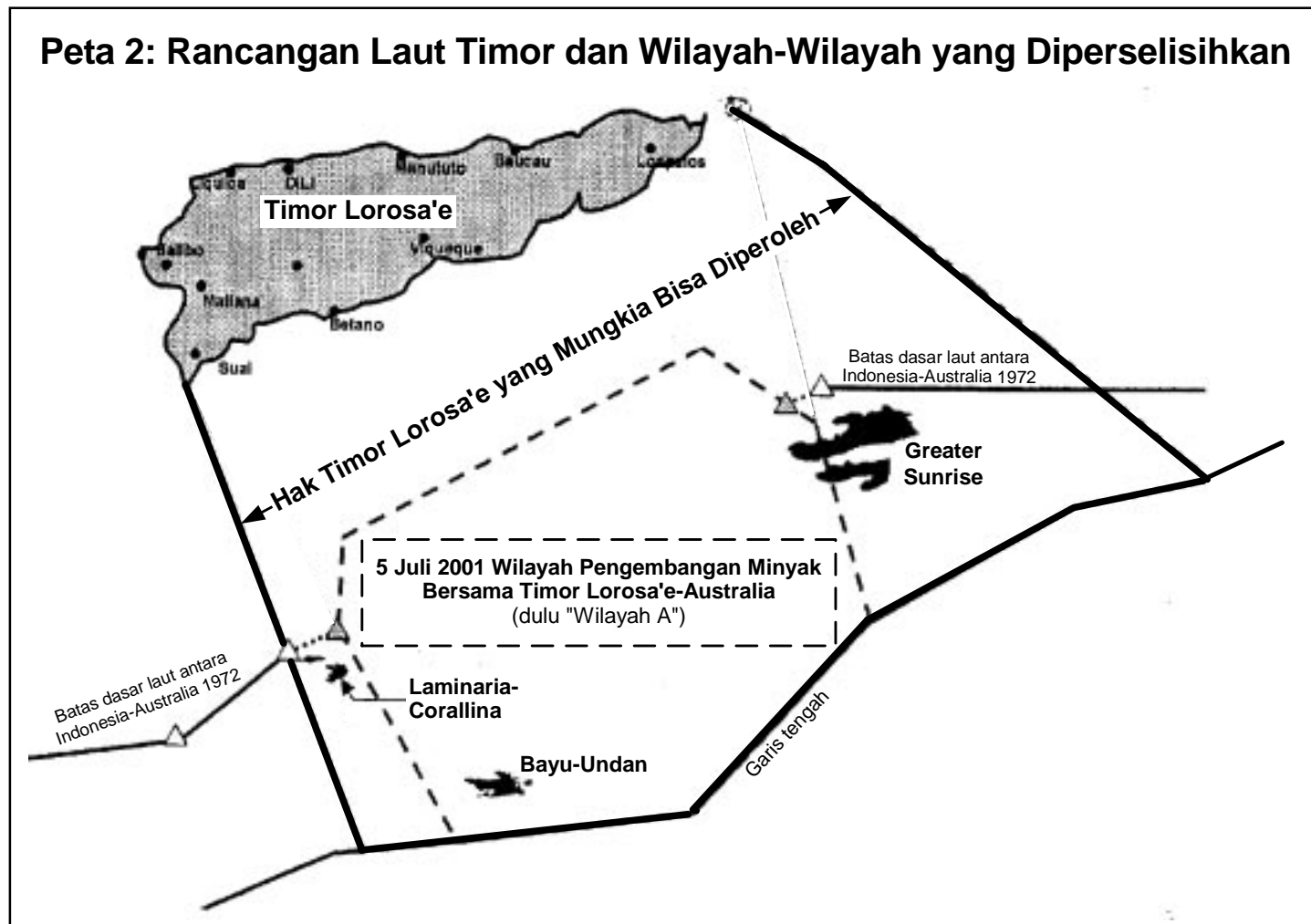
Pada tahun 1979, setelah kegemparan internasional atas invasi dan pendudukan brutal Indonesia terhadap Timor Lorosa'e mereda, Australia mulai berunding dengan Indonesia mengenai wilayah Celah Timor. Tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas perairan yang permanen, kedua negara memutuskan untuk membuat perjanjian tentang pengembangan minyak bersama di wilayah antara garis tengah ke selatan dan batas perairan dasar laut tahun 1972 ke utara. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 1981, Australia dan Indonesia menyepakati batas perikanan yang melintang sepanjang garis tengah. Dan pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan ulang hukum laut internasional mengatakan bahwa bagi negara-negara yang jarak antar mereka kurang dari 400 mil laut, maka batas internasional harus berada pada titik tengah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui Timor Lorosa'e sebagai bagian dari Indonesia. Namun, pada tahun 1989, meskipun terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor. Perjanjian ini membagi wilayah Celah Timor menjadi tiga bagian, di mana produksi minyak di wilayah terbesar, Wilayah A, dibagi sama rata antara kedua negara. Di Wilayah C, yang paling dekat dengan Timor Lorosa'e, 90% dari produksi akan diberikan kepada Indonesia dan 10% sisanya untuk Australia. Di Wilayah B, Indonesia menerima 10% dan Australia 90%. (Lihat Peta 1.)

Menurut pembagian ini, kontrak dilakukan dengan perusahaan-perusahaan minyak multinasional termasuk Phillip Petroleum yang berpusat di Amerika Serikat, Shell yang dimiliki Inggris dan Belanda, serta Woodside dan Broken Hill Propriety (BHP) yang berpusat di Australia. Kontrak-kontrak itu ditandatangani pada bulan Desember 1991 dan eksplorasi pertama dimulai pada tahun 1992. Bagi pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak ini, kemungkinan mendapatkan uang dari minyak lebih penting daripada hak asasi manusia dan hak politik Timor Lorosa'e.

Ketika eksplorasi di Celah Timor sedang dimulai, Portugal menggugat Australia dan Perjanjian Celah Timor ke Mahkamah Internasional (ICJ, International Court of Justice), dengan alasan bahwa perjanjian itu melanggar hak-hak Portugal dan rakyat Timor Lorosa'e. Pada akhirnya, pengadilan tidak dapat mengambil keputusan untuk kasus ini karena Indonesia menolak mengakui wewenang Mahkamah Internasional. Namun, gugatan ini penting karena membangkitkan kesadaran masyarakat internasional tentang Perjanjian Celah Timor, dan menegaskan kembali hak legal

**Peta 2: Rancangan Laut Timor dan Wilayah-Wilayah yang Diperselisihkan**



## PetroTimor: Sejarah Kuno?

Banyak ahli yang akhir-akhir ini mengajukan pertanyaan seputar pengembangan minyak di Celah Timor yang dibawa ke sini oleh PetroTimor, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. PetroTimor mulai terlibat dalam pengembangan minyak Timor Lorosa'e lebih daripada tiga puluh tahun lalu – dan keterlibatan mereka sekarang bisa berdampak luas.

PetroTimor adalah bagian dari Oceanic Exploration, Inc., sebuah perusahaan minyak kecil berpusat di Denver, Amerika Serikat. Oceanic Exploration adalah milik General Atomics, sebuah perusahaan besar Amerika Serikat yang terlibat dalam kontrak untuk militer, tenaga nuklir, dan elektronik. Oceanic Exploration pernah melakukan eksplorasi minyak di Yunani, Bolivia, Taiwan, dan tempat-tempat lain.

Menurut PetroTimor, Portugal memberikan konsesi kepada mereka untuk mengeksplorasi minyak di Laut Timor pada bulan Desember 1974, dengan imbalan Timor Lorosa'e memiliki 20% saham perusahaan PetroTimor. Timor Lorosa'e, yang waktu itu adalah wilayah jajahan Portugis, diperhitungkan akan merdeka dalam waktu beberapa tahun lagi. Perusahaan ini diberi hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan pengembangan wilayah dari pantai selatan Timor Lorosa'e sampai garis tengah antara Timor dan Australia, dengan batas perairan kira-kira sama dengan wilayah bersama 1989 yang sekarang diberi nama Joint Petroleum Development Area (lihat peta). Perusahaan ini mulai mengeksplorasi wilayah ini pada 1975, mengidentifikasi ciri-ciri utama di ladang yang sekarang disebut Bayu-Undan dan Greater Sunrise.

Ketika Indonesia menginvasi pada akhir tahun yang sama, kesepakatan PetroTimor menjadi tidak berarti karena Portugal tidak lagi menguasai Timor Lorosa'e. Perusahaan ini dipindahkan dari Dili, dan menghilang sampai bulan Juni 2001, dan tidak berperan dalam perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa'e. Tetapi ketika Timor Lorosa'e yang akan segera merdeka bersiap menandatangani Perjanjian Laut Timor dengan Australia, PetroTimor menegaskan kembali tuntutan mereka dalam usaha yang gagal untuk mengganggu negosiasi itu.

Pada bulan Agustus 2001, PetroTimor mengajukan gugatan hukum terhadap Phillips Petroleum serta pemerintah Indonesia dan Australia di pengadilan Australia, meminta ganti rugi sebesar lebih dari US\$1.5 milyar atas pengambilalihan hak milik mereka. Dalam gugatan ini, yang belum diputuskan pengadilan, PetroTimor menyatakan bahwa dengan perginya Indonesia dari Timor Lorosa'e konsesi mereka harus dikembalikan, dan semua perjanjian yang dibuat dengan perusahaan-perusahaan minyak oleh Australia dan Indonesia selama pendudukan tidak sah lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak sedang berusaha mengganggu rencana-rencana dan kontrak-kontrak yang sekarang, tetapi hanya mau meminta pembayaran atas harta-benda milik mereka.

PetroTimor juga mendekati pemerintah Timor Lorosa'e memintanya untuk menolak batas-batas Perjanjian Celah Timor dan menuntut batas-batas yang lebih luas sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut. Perusahaan ini juga mengajukan gagasan tentang pemasangan jalur pipa dan kilang pencairan LNG di Timor Lorosa'e, bukan jalur pipa ke Darwin atau kilang di tengah laut. *La'o Hamutuk* akan menguraikan hal ini dalam *Bulletin* edisi mendatang.

PetroTimor bisa memperoleh keuntungan besar dengan mengganggu kesepakatan yang sedang diusulkan sekarang, dan mereka tidak akan kehilangan apa pun. Mereka telah menawarkan untuk membayar pengacara-pengacara agar Timor Lorosa'e bisa mengajukan gugatan mengenai batas laut ke pengadilan. Sebagai pengganti untuk dilepaskannya konsesi yang mereka peroleh pada 1974, PetroTimor mengatakan bahwa mereka "berharap memperoleh bagian dari pendapatan yang akan diperoleh Timor Lorosa'e dengan perluasan batas landas laut Timor Lorosa'e, yang sekarang pendapatan ini menjadi bagian Australia." Perusahaan ini menawarkan sahamnya sebesar 20% kepada pemerintah Timor Lorosa'e dan berjanji akan menginvestasikan 20% dari keuntungannya dalam bisnis di Timor Lorosa'e.

Penyajian PetroTimor dalam seminar pada 23 Mei di Dili mengabaikan fakta-fakta kunci seperti gugatan PetroTimor di Australia. Tetapi, masalah-masalah yang mereka angkat itu penting sekali. Dan ketika pemerintah Timor Lorosa'e memutuskan mengajukan masalah batas laut ke pengadilan, mereka harus mempertimbangkan tawaran PetroTimor – bersama dengan yang lain-lain – di antara sumber-sumber untuk bantuan hukum.

Timor Lorosa'e atas penentuan nasib sendiri.

Pada tahun 1998, Dewan Nasional Perlawanan Timor Lorosa'e (CNRT, Conselho Nacional da Resistencia Timorese) mengumumkan akan mengupayakan revisi Perjanjian Celah Timor. CNRT berhati-hati dengan menjamin Australia bahwa mereka ingin melanjutkan pengembangan bersama dan kontrak perusahaan-perusahaan minyak akan tetap dihargai.

Setelah mayoritas rakyat Timor Lorosa'e memilih kemerdekaan melalui referendum pada tahun 1999, Indonesia terpaksa meninggalkan wilayah ini. Pada bulan Desember 1999, Mari Alkatiri, wakil CNRT untuk urusan minyak, sekali lagi mengumumkan penolakan CNRT untuk semata-mata menggantikan posisi Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor dan menegaskan keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah batas perairan. Tetapi pada bulan Februari 2000, UNTAET menyetujui "Pertukaran Nota" sementara dengan Australia mengenai Celah Timor. "Pertukaran Nota" ini melanjutkan isi Perjanjian Celah Timor tahun 1989, menggantikan Indonesia dengan Timor Lorosa'e untuk menangani investasi minyak yang sekarang sampai dengan kemerdekaan Timor Lorosa'e.

## Sebuah Kesepakatan Laut Timor yang Baru bagi Timor Lorosa'e?

Selama lebih dari satu tahun, UNTAET/Timor Lorosa'e dan Australia merundingkan bagaimana pengembangan minyak bersama akan dilanjutkan setelah kemerdekaan, ketika perjanjian "Pertukaran Nota" habis masa berlakunya. Pada 5 Juli 2001 sebuah Memorandum Saling Pengertian ditandatangani oleh wakil-wakil UNTAET dan pemerintah Australia yang secara resmi mengusulkan bahwa pada saat kemerdekaan sebuah perjanjian baru, "Rancangan Kesepakatan Laut Timor" dipertimbangkan untuk diratifikasi.

Para pemimpin politik Timor Lorosa'e berulang kali menyatakan bahwa mereka mengharapkan Kabinet dan Parlemen Timor Lorosa'e mengesahkan "Rancangan Kesepakatan Laut Timor" (kemudian disebut Rancangan, *ed.*) pada atau segera

setelah 20 Mei 2002. Ini mungkin tidak pernah terjadi, karena Timor Lorosa'e dan Australia masih membahasnya. Juga banyak masalah belakangan dikemukakan mengenai perjanjian yang diusulkan dan apakah rancangan itu, seperti yang dinyatakan para pendukungnya, adalah yang terbaik yang dapat dicapai Timor Lorosa'e dengan Australia.

Permasalahan kunci adalah apakah Rancangan itu membahayakan setiap langkah penyelesaian batas perairan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Tim perunding UNTAET dalam perundingan tentang Laut Timor terdiri dari orang-orang internasional yang dipimpin oleh Peter Galbraith, Menteri Kabinet Urusan Politik dan Laut Timor, dan pemimpin Timor Lorosa'e dipimpin oleh Menteri Ekonomi Pemerintah Transisi, Mari Alkatiri. Dengan

perhitungan mereka sendiri, ketika tim mulai berunding, mereka berkeinginan menyelesaikan permasalahan batas perairan terlebih dulu. Tetapi Australia menolak untuk membahas perbatasan, hanya setuju untuk membahas bagaimana membagi hasil pendapatan di Wilayah A berdasarkan perjanjian yang lama (sekarang disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama, Joint Petroleum Development Area).

Seperti yang dijelaskan oleh Galbraith dan Alkatiri, tim negosiasi Timor Lorosa'e selanjutnya memutuskan untuk meneruskan dengan menempuh dua jalan. Pertama, memasuki kesepakatan sementara mengenai pengembangan bersama sumber minyak yang tidak memutuskan batas perairan, tetapi akan memungkinkan Timor Lorosa'e segera memperoleh keuntungan dari operasi minyak. Kedua, mengajukan klaim batas perairan saat kemerdekaan dan melakukan perundingan batas perairan dengan Indonesia dan Australia. Menentukan dahulu batas perairan, menurut mereka, akan memakan waktu yang terlalu lama yang berarti hilangnya pendapatan segera untuk Timor Lorosa'e. Rancangan yang muncul diajukan sebagai perjanjian sementara untuk memfasilitasi pengembangan minyak dengan segera sambil menyelesaikan masalah-masalah batas perairan.

Seminar yang diselenggarakan di Dili baru-baru ini (23 Maret 2002) disponsori oleh PetroTimor (lihat *PetroTimor: Sejarah Kuno?*) menyajikan informasi yang berbeda, mengangkat keprihatinan mengenai Rancangan yang diusulkan dan apa kerugian Timor Lorosa'e jika kehilangan pendapatan. Menurut para pakar industri minyak yang berbicara dalam seminar itu, penandatanganan Rancangan ini akan membahayakan penyelesaian batas perairan Timor Lorosa'e menurut prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam seminar itu, para pakar mengemukakan bahwa dengan penandatanganan Kesepakatan ini, klaim Australia akan lebih kuat untuk mempertahankan batas dalam perjanjian sebagai batas perairan internasional, yang dengan demikian menjamin hak Australia atas beberapa ladang minyak dan gas yang paling besar dan paling bernilai, yakni ladang the Greater Sunrise dan Lamemaria-Corallina dengan potensi pendapatan

sampai US\$ 38 milyar (lihat Peta 2).

Dua hari setelah seminar ini, pemerintah Australia menarik diri dari proses hukum penyelesaian batas perairan melalui Mahkamah Internasional dan penyelesaian perselisihan di bawah UNCLOS, mengatakan bahwa "sikap kuat Australia adalah bahwa setiap perselisihan batas perairan paling baik diselesaikan melalui perundingan daripada melalui jalur hukum."

### Isi "Rancangan Kesepakatan Laut Timor"

Rancangan ini mencakup pengembangan minyak di wilayah yang disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area, JPDA), yang dalam Perjanjian Celah Timor antara Australia dan Indone-

sia disebut Wilayah A. Menurut perjanjian yang diusulkan Timor Lorosa'e akan memperoleh 90% royalti minyak dan gas dari JPDA, yang merupakan kemajuan nyata dari pembagian 50% dalam Perjanjian Celah Timor. ("Royalti" adalah persentase dari keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak. Perusahaan minyak memperoleh kira-kira 50% dari seluruh keuntungan produksi; 50% sisanya dibagi antara Timor Lorosa'e dan Australia seperti yang disebutkan oleh Rancangan). Karena ladang Greater Sunrise melintasi garis batas JPDA, maka disusun sebuah kesepakatan "unitisasi" khusus (unitisasi berarti melihat ladang sebagai satu unit atau kesatuan). Karena sekitar 20% ladang berada di dalam JPDA, Rancangan

memberikan 90% pendapatan kepada Timor Lorosa'e dari 20% produksi (yaitu 18%) di Greater Sunrise.

Dalam hal lapangan kerja, Rancangan menyatakan bahwa akan ada "tindakan yang memadai ... untuk menjamin bahwa lapangan kerja di dalam JPDA akan diberikan kepada warganegara atau kepada penduduk tetap Timor Lorosa'e." Tetapi, para pengacara buruh di Timor Lorosa'e dan Australia mengkhawatirkan bahwa ini terlalu umum untuk bisa dilaksanakan dengan efektif.

Dalam hal kontrak dengan perusahaan-perusahaan minyak, yang sekarang sama dengan Perjanjian 1989 (kecuali Timor Lorosa'e yang telah menggantikan Indonesia), Rancangan ini memungkinkan Timor Lorosa'e menarik pajak perusahaan-perusahaan atas bagian minyaknya sesuai dengan ketentuan Timor Lorosa'e. Hal ini memberi kekuasaan kepada Timor Lorosa'e wewenang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan menetapkan pajak yang tinggi, sebuah kekuasaan yang antara lain oleh Phillip Petroleum diprotes keras. Perusahaan-perusahaan perminyakan yang memulai aktivitas di bawah syarat-syarat Rancangan ini akan bisa memulai bekerja di ladang minyak dan gas di laut Timor dengan pengertian bahwa kondisi aktivitas mereka tidak akan berubah. Galbraith dan Alkatiri mencatat perlunya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Laut Timor untuk mengetahui bahwa investasi mereka aman, walaupun di masa mendatang ada perubahan batas negara. Sementara



Rancangan ini memperbolehkan aspek-aspek komersial dirundingkan sesudah perjanjian ini ditandatangani, ada tekanan dari Australia terhadap Timor Lorosa'e untuk menyelesaikan masalah-masalah komersial yang terperinci sebelum penandatanganan.

Mengenai masalah batas negara, perjanjian yang diusulkan menyatakan bahwa "Tidak ada yang termuat dalam Rancangan ini ... yang bisa ditafsirkan merugikan atau mempengaruhi posisi Timor Lorosa'e atau Australia atas atau hak yang berhubungan dengan perbatasan dasar laut, atau hak mereka masing-masing atas dasar laut," dan "Rancangan ini akan berlaku sampai ada batas perairan permanen antara Timor Lorosa'e dan Australia atau berlaku untuk 30 tahun." Banyak pengamat khawatir bahwa Australia akan menolak tuntutan Timor Lorosa'e atas batas perairan yang lebih luas, dan memblokir atau mengelak penyelesaian konflik ini selama 30 tahun, yang dalam waktu itu ladang minyak dan gas akan habis ditambang, dengan Australia memperoleh pendapatan dari ladang yang paling kaya.

Rancangan ini juga menyatakan menghormati "hukum internasional seperti yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa." Penolakan Australia baru-baru ini terhadap Mahkamah Internasional dan pasal-pasal tentang batas perairan Konvensi Hukum Laut PBB bertentangan, atau setidaknya-tidaknya menyebabkan komplikasi rancangan bagian ini.

Dalam sebuah opini hukum yang dibuat oleh PetroTimor pada bulan April 2002, tiga pakar hukum yang diakui internasional mengatakan bahwa meskipun ada ketentuan ini, "dalam prakteknya [Rancangan] pasti memandulkan klaim Timor Lorosa'e atas wilayah-wilayah di luar JDPA yang diusulkan." Menurut opini mereka, jika penentuan batas dalam perjanjian itu "dianggap merupakan kesepakatan yang bisa diterima oleh Australia dan Timor Lorosa'e ketika mereka memasuki perjanjian tersebut, tidak mungkin bahwa suatu pengadilan ... akan menganggap batas tersebut tidak adil."

Menurut Alkatiri dan lain-lain pada tim perunding UNTAET/Timor Lorosa'e, ini berkontradiksi dengan nasehat pakar hukum utama mereka yang mengatakan bahwa dalam Rancangan jelas disebutkan bahwa tidak memutuskan atau berdampak pada batas perairan Timor Lorosa'e nantinya. Dalam sebuah wawancara dengan *La'o Hamutuk*, Alkatiri

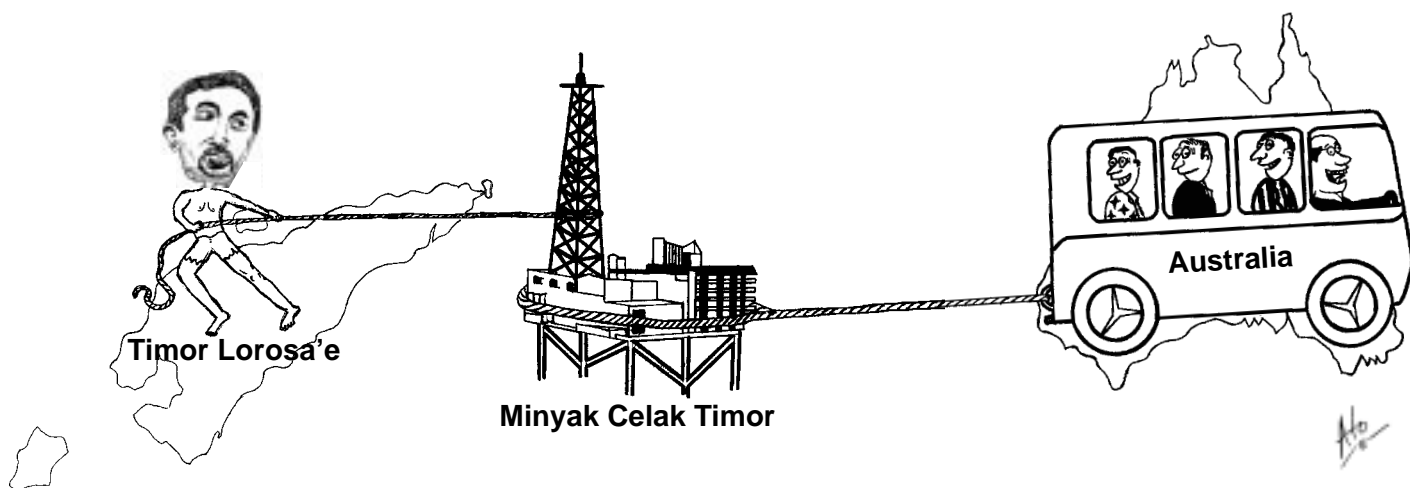
menyatakan keprihatinan bahwa PetroTimor menyebarkan disinformasi untuk keuntungan mereka sendiri. Ia menjelaskan bahwa tim perunding sangat baik pengetahuannya dan sangat mengetahui persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian batas perairan melalui proses pengadilan internasional, dan karena itu memberi prioritas pada perundingan. Seperti Indonesia, yang tidak pernah mengakui yurisdiksi pengadilan internasional, Australia punya hak untuk tidak mengakui pengadilan tersebut. Australia, demikian Alkatiri, "menggunakan apa yang akan dengan paling baik mempertahankan kepentingan mereka dan kami harus menggunakan apa saja yang paling bisa membela hak-hak kami."

Pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Timor sedang mendesak Timor Lorosa'e untuk segera meratifikasi Rancangan tersebut. Namun, banyak anggota calon Parlemen Timor Lorosa'e tidak merasa bahwa mereka punya informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang penting ini. Begitu ditandatangani, perjanjian ini tidak mudah untuk dibatalkan.

Memahami perlunya suatu kerahasiaan dalam melakukan perundingan-perundingan yang peka, juga sangat penting bahwa rincian dari perundingan tersebut yang tidak mengorbankan strategi atau posisi Timor Lorosa'e dalam perundingan, harus dibuka untuk umum. Informasi publik, pada setiap tahap perundingan, juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami banyak orang Timor Lorosa'e (naskah Rancangan yang diusulkan ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris).

Dalam perundingan-perundingan, kami sangat mendorong pemerintah Timor Lorosa'e untuk memperoleh penasehat yang terpercaya yang memberikan keahlian yang sudah terbukti di berbagai bidang yang relevan. Juga sangat penting agar sebanyak mungkin orang Timor Lorosa'e diikutsertakan dalam semua bagian proses ini untuk memberikan pengalaman dan membangun kapasitas.

Ketika Timor Lorosa'e merayakan kemerdekaan, para pemimpin negara baru ini harus memperlihatkan komitmen mereka pada transparansi, informasi umum, dialog, dan proses demokratis. Sumber minyak dan gas di Laut Timor adalah milik semua orang Timor Lorosa'e dan merupakan simbol potensi Timor Lorosa'e untuk kemandirian dan keadilan. ❖





## Editorial

Sejumlah faktor akan menentukan kesuksesan kemerdekaan Timor Lorosa'e dalam membangun dan memelihara masyarakat yang menjamin tingkat pengembangan sosial ekonomi yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional bagi seluruh rakyatnya. Salah satu faktor yang paling penting adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan perekonomian nasionalnya. Dalam hal ini, pertarungan tanpa henti antara Australia dan Timor Lorosa'e atas penguasaan kandungan minyak dan gas alam di Celah Timor merupakan satu hal yang paling penting dan menentukan.

Walaupun Timor Lorosa'e sedang menantikan kemerdekaan, Australia sekali lagi berusaha merampas hak sah negara ini atas kekayaan alamnya sama dengan yang dilakukan pemerintah Canberra secara memalukan ketika menandatangani Perjanjian Celah Timor pada 1989 dengan penguasa pendudukan Indonesia. Seperti hal yang menjadi jelas di bulan Maret pada sebuah seminar mengenai Celah Timor di Dili, batas Barat-Timur Celah Timor ditarik dengan cara yang tidak adil yang menjamin kontrol Australia atas sejumlah kandungan terbesar seperti Greater Sunrise dan Laminaria/Corallina. Seandainya perbatasan ditentukan mengikuti hukum internasional, kandungan ini sebagian besar akan menjadi milik Timor Lorosa'e.

Walaupun mustahil untuk mengetahui dengan jelas berapa besar pendapatan yang diperoleh Timor Lorosa'e dari Celah Timor karena naik-turunnya harga internasional, diperkirakan US\$ 8 milyar akan masuk ke perbendaharaan nasional di bawah perjanjian sekarang ini yang berlaku selama beberapa dasawarsa mendatang. Namun, kalau perjanjian dibuat berdasarkan hukum internasional, Timor Lorosa'e akan memperoleh lebih dari US\$ 35 milyar. Sementara bagi Australia, perbedaan itu sangat berarti, bagi Timor Lorosa'e perbedaan itu akan merupakan perbedaan antara tetap terbelit kemiskinan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sosial ekonomi seluruh warganegara.

Dalam mengantisipasi kemungkinan upaya Dili untuk merundingkan ulang perbatasan, baru-baru ini Canberra mengumumkan menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perbatasan laut Mahkamah Internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Perubahan bertentangan langsung dengan Rancangan Perjanjian Laut Timor antara Australia dan Timor Lorosa'e 5 Juli 2001; hal ini juga menunjukkan Australia tidak berniat membiarkan Timor Lorosa'e mendapatkan bagian yang adil dari kandungan minyak dan gas alam di Laut Timor. Dengan bahasa yang merendah, Ketua Menteri Mari Alkatiri, menyebut tindakan Canberra "suatu tanda kurangnya kepercayaan kepada kami, dan satu tindakan yang tidak bersahabat."

Australia menegaskan bahwa apa yang mereka pandang sebagai mekanisme permusuhan seperti Mahkamah Internasional itu tidak mereka anggap sebagai mekanisme yang baik untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antar negara tetangga.

Sebaliknya, Canberra memperjuangkan negosiasi bilateral. Namun ini jelas suatu penggunaan tangan besi terhadap Timor Lorosa'e yang jauh lebih lemah agar menerima kesepakatan yang tidak adil ini. Canberra sangat mengetahui bahwa Dili berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk menjamin agar pendapatan dari Celah Timor mulai masuk ke kas Timor Lorosa'e yang miskin secepat mungkin dan untuk memelihara hubungan yang baik dengan tetangga di sebelah selatan yang kuat dan kaya-raya. Australia berharap Timor Lorosa'e hanya punya ruang berunding yang sempit dari posisi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Parlemen Timor Lorosa'e berada di bawah tekanan besar untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Laut Timor dan secepat mungkin mengubahnya menjadi perjanjian. Parlemen harus melawan tekanan semacam ini. Sementara Australia mengaku bahwa penandatanganan perjanjian ini tidak membuat hilangnya kemampuan kedua negara untuk melakukan negosiasi ulang perbatasan barat-timur di kemudian hari, banyak pakar hukum internasional berpendapat bahwa perjanjian tersebut menutup kemungkinan ini. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa'e harus menuntut waktu yang cukup untuk diskusi publik dan opini-opini legal yang independen menyangkut masalah ini. Pada saat yang sama, perundingan-perundingan dengan Australia dan/atau dengan perusahaan-perusahaan minyak multinasional sedapat mungkin harus transparan dan partisipatif.

Pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e yang terlibat dalam perundingan selama dua tahun ini perlu menjelaskan tentang proses perundingan tersebut dan mereka harus terbuka untuk diskusi publik. Ada banyak pertanyaan yang belum dijawab dengan jelas, dan banyak masalah yang belum dijelaskan secara memadai. Misalnya, sejumlah pemimpin Timor Lorosa'e telah lama menyadari ketidakadilan perbatasan Barat-Timur Celah Timor. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa mereka baru mulai mengangkat masalah itu secara publik setelah seminar bulan Maret lalu di Dili.

*La'o Hamutuk*, menyerukan pemerintah Australia untuk menunjukkan komitmennya pada kekuasaan hukum dan untuk menyetujui batas laut melalui jalur hukum internasional. Secara bersamaan, kami menyerukan kepada sektor-sektor masyarakat sipil Australia yang pro-Timor Lorosa'e dan gerakan solidaritas internasional untuk waspada dan aktif mempertahankan kepentingan Timor Lorosa'e. Perebutan atas kekayaan alam di Celah Timor adalah pertarungan yang penting dan menentukan dalam perjuangan Timor Lorosa'e bagi penentuan nasib sendiri yang masih berlangsung sekarang. Canberra berperan penting dalam menunda kemerdekaan politik Timor Lorosa'e dari tahun 1975 sampai 1999. Karena kemerdekaan Timor Lorosa'e sudah di ambang pintu, Australia tidak bisa dibiarkan merusak masa depan negara baru ini. ❖

# ***Timor Lorosa'e Menghadapi Tantangan Pasca UNTAET:***

## **Apa yang Harus Dilakukan?**

Pada tanggal 20 Mei, rakyat Timor Lorosa'e memulai tahap perjalanan mereka yang menggembirakan dan juga tahap yang sulit. Setelah hampir tiga tahun pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa, 24 tahun pendudukan Indonesia, dan empat abad kolonial Portugis, Timor Lorosa'e akan mengontrol nasibnya sendiri.

Penyerahan kedaulatan akan menjadi terhormat dan bersejarah, dan *La'o Hamutuk* bergabung dalam semangat perayaan ini. Kami secara khusus merayakan rakyat Timor Lorosa'e, termasuk perlawanan FALINTIL, front klandestin dan diplomatik atas keteguhan dan perjuangan mereka menuju kemenangan melawan pendudukan Indonesia yang kejam dan brutal. Selama seperempat abad yang berdarah, Timor Lorosa'e bukan saja harus melawan tentara Indonesia tetapi juga harus melawan keterlibatan dan pengabaian negara-negara tetangga dan kekuatan-kekuatan global.

Pemerintah baru Timor Lorosa'e menghadapi tantangan besar dari sumber yang berbeda-beda. Beberapa masalah berasal dari empat abad kekuasaan kolonial – Portugal berbuat sedikit untuk mengembangkan pelayanan ekonomi dan sosial Timor Lorosa'e. Masalah lain diciptakan oleh pendudukan brutal Indonesia selama 24 tahun, yang membinasakan sebagian besar penduduk, menghancurkan masyarakat dan komunitas lokal, dan menimbulkan ketergantungan budaya, korupsi, tidak adanya kerjasama dan perlawanan. Pembalasan pasca referendum tahun 1999 menghancurkan sebagian besar infrastruktur dan rumah, serta memindahkan secara paksa mayoritas penduduknya.

Tantangan-tantangan lebih lanjut muncul dari periode transisi sejak tahun 1999, dalam mana ketidakefisienan yang bersifat sistemik, budaya dan manusia dalam administrasi PBB menghambat diselesaikannya secara efektif banyak masalah.

Timor Lorosa'e dulu adalah "provinsi" termiskin Indonesia, dengan angka kematian anak termasuk yang tertinggi di dunia. Setelah berabad-abad keterbelakangan, kemiskinan terdapat di mana-mana. Menurut Komisi Perencanaan Nasional, 41% orang Timor Lorosa'e hidup dalam kemiskinan dan 48% buta huruf. Kemiskinan di daerah pedesaan 46% dan di perkotaan 26%.

### **Tiga tahun kekuasaan PBB**

Sekalipun Perserikatan Bangsa-Bangsa tercatat mendukung hak penentuan nasib sendiri Timor Lorosa'e selama bertahun-tahun, baru pada 5 Mei 1999 negara-negara besar memperlihatkan dukungan politik yang cukup untuk melakukan tindakan yang efektif. Pada tanggal itu, PBB, Indonesia, dan Portugal menandatangani perjanjian untuk menyelenggarakan referendum, dan mengesahkan kontrol tentara Indonesia di Timor Lorosa'e selama dan setelah pemberian suara. Dalam mengevaluasi kinerja PBB di sini, satu kasus dapat diangkat untuk menggunakan tanggal itu sebagai referensi, bukannya kondisi-kondisi berantakan ketika InterFET dan UNTAET tiba pada akhir September.

Referendum 30 Agustus berhasil karena keberanian rakyat Timor Lorosa'e yang luar biasa, staf UNAMET dan pemantau internasional yang datang membantu mereka. Indonesia menghasut kekerasan setelah secara luar biasa pro-kemerdekaan memilih seperti yang diramalkan, tetapi masyarakat internasional gagal bertindak untuk mencegahnya. Dalam waktu tiga minggu sebelum InterFET dan UNTAET tiba di Timor Lorosa'e, tentara Indonesia dan milisi bentukannya melaksanakan aksi penghancuran seperti yang mereka rencanakan.

UNTAET datang dengan mandat dari Dewan Keamanan. Meskipun salah satu definisi tentang tanggungjawab UNTAET bisa ditarik dari kata-kata Resolusi No. 1272/1999, penafsiran yang bersifat kurang legalistis memberi misi ini tiga tugas utama:

1. Melindungi keamanan Timor Lorosa'e dan menangani keadaan darurat kemanusiaan yang terjadi akibat pendudukan Indonesia dan penghancuran tahun 1999.
2. Mempersiapkan Timor Lorosa'e untuk memerintah sendiri setelah masa transisi berakhir.
3. Memerintah Timor Lorosa'e selama masa transisi.

Kesemuanya itu merupakan tugas yang amat berat, dan dua yang terakhir merupakan tugas baru bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada bulan Juli 2001, Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa: "Mandat yang mana dipercayakan kepada kami di Timor Lorosa'e kurang lebih adalah sebuah katalog masalah yang harus diselesaikan. Itu merupakan kurang lebih bekerja dengan rakyat Timor Lorosa'e yang mengalami trauma dan kekejaman, dan bersama-sama menciptakan negara yang merdeka dan berdaulat." Timor Lorosa'e akan segera merdeka dan berdaulat, tetapi banyak trauma dan sejumlah masalah dalam katalog itu akan tertinggal untuk waktu yang lama.

### **Mulai dari "bawah nol"**

Tugas masyarakat internasional setelah referendum adalah menjamin **keamanan** Timor Lorosa'e dan membantu Timor Lorosa'e untuk bangkit dari keadaan darurat. Itu sebagian besar sukses, meskipun dari awalnya lamban menangani krisis. Ketika Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk bertindak, ia menggunakan tekanan diplomatik untuk memaksa pemerintah Indonesia menyetujui intervensi pasukan internasional dan menarik tentara dan polisi Jakarta yang melakukan kekerasan. Ini memungkinkan International Force for East Timor (InterFET, Pasukan Internasional untuk Timor Lorosa'e) dan Pasukan Penjaga Perdamaian (Peace Keeping Force, PKF) untuk memasuki Timor Lorosa'e, mengamankan wilayah itu dan mengembalikan ketertiban setelah penarikan pasukan Indonesia dan milisi.

Pemindahan paksa atau perginya 550.000 dari 800.000 rakyat Timor Lorosa'e merupakan masalah besar berikutnya. Dengan adanya dukungan yang luas dari badan-badan internasional dan NGO internasional secara efektif,



mencegah penderitaan kelaparan yang berarti dan pemindahan penduduk di dalam negeri yang berkepanjangan. Lihat tulisan “55.000 rakyat Timor Lorosa’e Masih tertahan di Indonesia” halaman 14 untuk suatu analisis yang lebih mendalam mengenai banyak orang Timor Lorosa’e yang melarikan dengan paksa, dan hampir 60.000 belum dapat kembali ke kampung halaman mereka.

Sekalipun krisis langsung ditangani secara baik, orientasi penanganan krisis dari banyak pemimpin UNTAET yang telah berpengalaman sebelumnya bekerja dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau organisasi-organisasi lain untuk menangani sebagian besar korban yang tidak berdaya dalam situasi darurat, telah menyebabkan masalah bagi misi. Bukannya melihat rakyat Timor Lorosa’e sebagai pemenang dari perjuangan panjang dan sulit, mereka itu kerap kali dipandang sebagai korban yang tak berdaya. Lebih lanjut, banyak staf internasional dan media menganggap masyarakat Timor Lorosa’e sebagai masyarakat yang suka berbuat kekerasan, dan sebagian orang Timor Lorosa’e menerima pandangan yang diajarkan oleh Indonesia selama lebih dari dua dasawarsa itu. Misalnya, UNTAET dan media internasional kagum atas pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2001 yang damai, walaupun sebenarnya tidak ada alasan untuk menduga yang sebaliknya. Mereka gagal memahami bahwa kekerasan di negeri ini sejak tahun 1975 sampai 1999 hampir sepenuhnya dimanipulasi atau dipaksakan oleh tentara Indonesia, dan tentara itu telah pergi meninggalkan negeri ini.

Tugas lain yang belum diselesaikan adalah menangani **ribuan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan** selama seperempat abad yang sebagian besar masih berada di Indonesia. Sebagian masalah yang berkaitan dengan keadilan telah ditangani, tetapi sebagian besar masih belum dituntaskan (lihat “Harus Dilakukan: Keadilan Masih Tertunda”, halaman 12). Para pelaku kejahatan utama, pembuat kebijakan dan pejabat-pejabat militer tinggi di Indonesia dan pemerintahan lain, sejauh ini sepenuhnya menikmati impunitas. Berbeda dengan banyak tantangan dalam artikel ini, keadilan akan tidak mungkin diwujudkan jika Timor Lorosa’e merdeka harus mengupayakannya sendiri, dan masih memerlukan pengadilan dan kemauan politik yang didukung internasional, yang sampai sekarang masih sangat kurang, untuk memaksa Indonesia bekerjasama. Kemajuan telah dicapai di bidang rekonsiliasi basis dan dalam pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR), tetapi kami berharap bahwa visibilitas yang tinggi KPKR tidak mengaburkan kebutuhan atas keadilan yang lebih mendasar.

### Mempersiapkan pemerintahan sendiri

Warisan UNTAET itu bermacam-macam. Kemajuan yang baik yang dilakukan di bidang keamanan, penulisan Konstitusi, dan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Pemilihan Majelis Konstituante dan Presiden yang dan adil

dan damai, serta hasilnya mencerminkan keinginan rakyat.

Namun, **pendidikan kewarganegaraan** untuk pemilihan umum itu fokusnya terlalu diarahkan pada proses pemilihan dan tidak untuk menciptakan pemahaman perwakilan dan kerjasama antara pejabat-pejabat yang dipilih. Terlalu sedikit diskusi tentang bagaimana warganegara dapat mempengaruhi dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, suatu topik yang sangat diperlukan bagi generasi perlawanan rakyat terhadap pasukan pendudukan yang otokratik. Debat-debat yang kini berlangsung seputar kurangnya konsultasi rakyat, pengambilan keputusan secara personal, pembatasan akses informasi, dan tidak adanya pemerintahan yang inklusif merupakan warisan pendudukan dan juga kegagalan mempopulerkan gagasan-gagasan tersebut selama masa transisi.

Satu pekerjaan yang tertinggal untuk orang Timor Lorosa’e adalah pengembangan **mekanisme registrasi sipil** yang akurat, yang digunakan sebagai daftar pemilih dan untuk perencanaan serta pengiriman pelayanan sosial, paspor, dan keadilan. Sekalipun

UNTAET mengklaim telah membentuk kantor registrasi sipil dan mendaftarkan 737.811 orang, para ahli independen memperkirakan bahwa data 25% tidak akurat, bertambah buruk dari hari ke hari. Meskipun registrasi itu digunakan untuk pemilihan umum tahun 2001 (dengan banyak masalah yang ditimbulkan), Komisi Pemilihan Independen memutuskan untuk tidak menggunakannya selama tahun 2002.

Sistem registrasi sipil UNTAET menggunakan komputer Siemens, dan dirancang dan dilaksanakan oleh orang-orang internasional yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang registrasi di manapun. Itu tampaknya tidak sesuai untuk masyarakat ini, dan mustahil mempertahankan tanpa konsultan-konsultan asing yang mahal itu. Sejumlah ahli-ahli independen merekomendasikan agar Timor Lorosa’e membuang semua sistem itu dan memulai dari awal.

Meskipun UNTAET mengajarkan **pemerintahan yang baik, transparansi, keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban, demokrasi, dan penegakan hukum untuk orang Timor Lorosa’e**, sangat sedikit yang mereka praktekkan. UNTAET adalah suatu pemerintah tanpa konstitusi, dengan semua kekuasaan berada di tangan satu orang, Administrator Transisi Sergio Vieira de Mello. Sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB de Mello (SRSG, Special Representative of the UN Secretary-General), de Mello mempertanggungjawabkan kepada seseorang yang tidak berada di sini, mengandalkan mandat yang dikeluarkan oleh diplomat-diplomat asing di dunia. Konsultasi dengan pemimpin-pemimpin Timor Lorosa’e atau siapapun semata-mata menurut kehendak SRSG. Setiap peraturan selama Masa Transisi diawali dengan “Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB ... mengesahkan sebagai berikut ....”

Otokrasi yang temporer dan baik ini menggantikan otokrasi yang jelek selama beberapa abad dan beberapa dekade, dan merupakan perbaikan yang berarti. Namun, gagal untuk mempraktekkan pertanggungjawaban, transparansi, atau

demokrasi, dan hanya memberi kesempatan yang kecil kepada masyarakat Timor Lorosa'e untuk mengalami kehidupan masyarakat yang demokratis. UNTAET dicirikan oleh kekuasaan yang terpusat, tidak adanya kebebasan informasi, proses pengambilan keputusan yang tertutup, dan banyaknya personil asing yang tidak memenuhi syarat. Dengan personil militer dan polisi yang jumlahnya lima kali lipat personil sipil, UNTAET mungkin adalah pemerintah yang paling banyak dibebani personil keamanan di dunia. Staf internasional, kebanyakan di sini dengan kontrak jangka pendek dan sedikit pengalaman yang relevan atau sedikit pemahamannya tentang sejarah dan kebudayaan Timor Lorosa'e, memberikan loyalitas dan kariernya kepada PBB dan misi UNTAET, bukan kepada rakyat Timor Lorosa'e.

Proyek-proyek lain, seperti yang dikelola oleh Dana Perwalian Bank Dunia (TFET, World Bank's Trust Fund) jarang yang baik. Sebagian besar pembuat kebijakan tidak menanyakan pandangan publik, menerima masukan masyarakat sipil atau politik hanya atas tekanan. Di Timor Lorosa'e, "konsultasi" telah didefinisikan ulang sebagai "sosialisasi", dengan sedikit atau tanpa pengaruh dari yang diajak konsultasi atas keputusan pihak yang mengadakan konsultasi.

Hampir genap dua tahun usia misi, SRSG mengatakan kepada Dewan Kemanan "**membangun kapasitas** terbukti mengecewakan dan sulit di masa lalu, dan kami di PBB terlalu sering mencari manager dibandingkan mentor, yang karena itu tidak melihat perlunya memberi kemampuan dalam bidang transfer keterampilan yang vital ini." Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun lalu, salah satu tantangan terbesar Timor Lorosa'e adalah kurangnya orang yang terlatih, diberdayakan untuk mengelola sistem pemerintahan dan pelayanan sosial. Apabila sejak awal lebih banyak staf internasional UNTAET memahami bahwa mereka datang ke sini untuk membantu, bukan untuk melakukan segala sesuatu, maka rintangan dihadapi oleh Timor Lorosa'e bisa lebih kecil.

Komunitas internasional mengakui ketidakmampuan lembaga-lembaga Timor Lorosa'e untuk menangani beberapa bidang – khususnya militer, polisi, dan manajemen fiskal – dan akan melanjutkan memberikan staf internasional. Kami berharap para ahli itu akan memusatkan pada pengembangan kapasitas orang Timor Lorosa'e, dan kami percaya bahwa masih banyak bidang lain yang kapasitasnya sangat sedikit. Kami juga mendorong mereka untuk memberdayakan dan pelatihan sekurang-kurangnya prioritas yang sama dengan pelaksanaan tugas. Sayangnya, PBB telah memutuskan untuk tidak menyediakan dukungan yang berkelanjutan untuk bidang-bidang termasuk perencanaan nasional, pelayanan kesehatan, infrastruktur, komunikasi, dan sistem peradilan.

UNTAET mengimpor banyak mesin untuk keperluan mereka sendiri, mengeluarkan puluhan juta dolar untuk peralatan-peralatan baru, termasuk: 1.350 mobil baru, 1.800 komputer meja, 1.500 printer dan lebih dari 500 laptop dan 200 mesin fax, 74 komputer penyimpan data, mesin pendingin, generator, bangunan Kobe, dan mebel kantor. Sejumlah aset itu akan dialihkan ke administrasi Timor Lorosa'e, tetapi banyak akan dibawa pergi – seringkali

disimpan di gudang atau ditimbun. Pemerintah Timor Lorosa'e harus memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

### Memerintah selama Transisi

Selain untuk mempersiapkan Timor Lorosa'e membentuk pemerintahan sendiri, UNTAET bertanggungjawab atas semua fungsi dasar pemerintah dasar: pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi, undang-undang hak milik, pegawai negeri sipil, keamanan umum, pertahanan, pengawasan perbatasan, keadilan, transportasi, perencanaan, dan kesejahteraan sosial. Banyak dari bidang tersebut telah ditangani serta dapat diduga berdasarkan awal dimulainya, ketiadaan pengalaman personilnya dan persoalan-persoalan sistemik misi. Akan tetapi fungsi-fungsi itu diperlukan, dan pemerintah baru Timor Lorosa'e harus mengambil apa yang telah ditinggalkan UNTAET.

Di bidang **pendidikan**, UNTAET dan kepemimpinan Timor Lorosa'e menyetujui bahwa yang terbaik yang harus dilakukan PBB adalah tidak mengurus. Banyak sekolah telah diperbaiki ulang, tetapi peralatan masih sangat kurang. Bahan-bahan pelajaran dan kurikulum perlu dirumuskan dan didistribusikan, rumit karena multi-bahasa yang digunakan di Timor Lorosa'e. Tantangan terbesar adalah kurangnya guru-guru yang berpengalaman: selama pendudukan Indonesia hampir semua guru adalah orang Indonesia. Karena tidak ada pekerjaan untuk guru-guru Timor Lorosa'e, sedikit orang yang mengikuti pendidikan keguruan. Sekarang Indonesia telah pergi, kevakuman itu akan butuh waktu bertahun-tahun untuk diisi.

Berdasarkan saran dari badan-badan internasional yang berusaha meminimalkan kesenjangan anggaran Timor Lorosa'e, **pelayanan kesehatan** diperkecil secara signifikan dari yang ada pada masa Indonesia. Meskipun kita tidak memiliki data statistik, banyak anekdot memperlihatkan kekurangan personil dan peralatan yang bisa mematikan, bahkan di kota-kota besar. Dari 25 orang Timor Lorosa'e yang bekerja di gedung *La'o Hamutuk* di Dili, misalnya, lima memiliki bayi dalam enam bulan ini; empat meninggal beberapa hari setelah lahir. Pada saat menulis tulisan ini, aliran listrik di Rumah Sakit Ermera mati selama dua minggu, karena tidak ada aliran listrik di kota itu dan tidak tersedia bahan bakar untuk generator. Obat-obat utama sangat langka di seluruh negeri, dan masyarakat di pedesaan tidak memiliki akses kepada dokter atau perawat.

UNTAET tidak pernah menangani pembangunan **ekonomi** Timor Lorosa'e secara berarti. Misi itu sendiri menghabiskan kurang dari 1% anggarannya untuk staf Timor Lorosa'e, dengan mayoritas besar dari \$2 juta yang diterima mengalir keluar dari Timor Lorosa'e ke kantong keluarga-keluarga staf internasional, peralatan yang diimpor, pajak tidak dipungut dari bisnis asing (Lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2 No. 1-2).

Sektor perdagangan kecil yang berkembang di sini – restoran, perusahaan penyewaan mobil, hotel, supermarket untuk orang asing – umumnya dimiliki oleh orang asing, banyak yang akan tutup segera setelah staf internasional yang dibayar lebih banyak dari yang semestinya dan bersikap mudah membuang uang pergi. Regulasi untuk investasi,

buruh, hak atas milik, dan bidang-bidang lain yang penting untuk sektor ekonomi swasta terlambat atau tidak ada.

Timor Lorosa'e mengantisipasi uang dari minyak dan gas Laut Timor (lihat halaman 1-7) dalam beberapa tahun mendatang, tetapi dalam pada itu, hanya sedikit perkembangan ekonomi di luar industri kopi yang kecil (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol.3 No 2-3) dan pertanian lokal yang menghasilkan makanan untuk penduduk Timor Lorosa'e. Pengangguran meningkat cepat, Ketua Menteri mengatakan kepada PBB berkisar antara 80%. Mayoritas pekerjaan yang dibayar ada di pemerintah dan NGO, dan akan semakin berkurang karena uang dari donor menyusut dan staf internasional pergi.

Timor Lorosa'e mengalami kerumitan **masalah tanah dan harta benda** yang jumlahnya tak bisa dihitung, sebuah masalah yang dengan bijaksana UNTAET menganggapnya terlalu sulit untuk ditangani. Bangsa Timor Lorosa'e akan harus menangani perselisihan-perselisihan itu, dan benturan kepentingan akan terlalu sulit untuk dipilah-pilah.

Walaupun UNTAET telah mengorganisir atau membangun kembali sejumlah sistem dasar – radio, televisi (hanya di Dili), telepon (hanya di kota-kota besar), dalam jumlah terbatas air, jalan raya, dan listrik, semua pelayanan itu tidak akan berjalan lama. Menurut Komisi Perencanaan Nasional, hanya 20 % penduduk Timor Lorosa'e yang bisa mendapatkan air ledeng – walaupun staf UNTAET mendapat banyak air botolan yang diimpor (Lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2 No. 1-2). Perbaikan dan peningkatan kecil telah dilakukan di Dili agar air ledeng dapat beroperasi lagi, tetapi di distrik-distrik air sama sekali terbatas, sekalipun di kota Baucau.

**Listrik**, sampai 20 Mei, menjadi tanggungjawab UNDP dan Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development Bank), didanai melalui bantuan bilateral dari Portugal dan Jepang serta TFET. Di Dili listrik mati setiap hari; di luar Dili, beberapa tempat listrik menyala lebih dari beberapa jam setiap hari, dan seringkali tidak setiap hari. Tantangan untuk Timor Lorosa'e adalah: bagaimana menyediakan listrik ketika harga bahan bakar begitu mahal; bagaimana memperbaiki atau memelihara yang lama, seringkali peralatan mengalami kerusakan, bagaimana menagih pembayaran, bagaimana mengelola dan memperluas sistem?

**Telekomunikasi**, Telstra diberikan kontrak yang eksklusif oleh UNTAET untuk pelayanan telepon *mobile* dan saluran telepon darat. Monopoli legal ini menyebabkan inflasi atas harga Australia dan menyediakan pelayanan yang terbatas. Masa kontrak Telstra berakhir pada saat kemerdekaan dan tawaran untuk jasa pelayanan baru (Telstra memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak) harus diajukan sampai 14 Mei. Sama halnya, UNTAET dan donor mengembangkan stasiun radio dan televisi, dan melatih banyak orang Timor Lorosa'e di bidang jurnalisme elektronik dan produksi. Masa depan media ini tidak menentu, karena media itu tidak memiliki kelayakan komersial. Pemerintah Timor Lorosa'e tidak mampu mempertahankannya, dan seberapa dukungan yang diberikan pemerintah Portugis sedang dibahas.

**Transportasi**, menurut salah seorang pejabat UNTAET, adalah “sebuah mala petaka.” Jalan raya di seluruh Timor

Lorosa'e berada dalam kondisi yang parah, khususnya di pedesaan dan pada musim hujan. Kendaraan berat UNTAET dan PKF dalam jumlah besar yang hanya memperburuk keadaan, dan banyak perbaikan dikerjakan sembarangan yang hanya bertahan dalam beberapa minggu. UNTAET sangat tergantung pada insinyur-insinyur PKF untuk pemeliharaan jalan raya, dan Timor Lorosa'e akan butuh mengembangkannya sendiri, lebih luas, lebih kuat.

Isolasi daerah **kantong Oe-cusse** masih merupakan masalah yang penting (lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol.1 No. 2-3). Meskipun berulang-ulang janji diucapkan selama lebih dari dua tahun, masih tidak ada transportasi lewat laut antara Oe-cusse dan wilayah lain di Timor Lorosa'e. UNTAET berusaha merundingkan angkutan darat lewat Indonesia, tetapi perundingan gagal. Sebagai penyelesaian sementara, UNTAET memperbolehkan sedikit orang Timor Lorosa'e untuk bepergian ke daerah kantong dengan pesawat PBB, tetapi penerbangan itu akan berakhir saat kemerdekaan. Kesatuan Timor Lorosa'e tergantung pada penyelesaian yang tepat guna untuk persoalan yang sejauh ini sukar dipecahkan.

Banyak bidang yang lebih sulit – **hubungan polisi-masyarakat, kekerasan dalam rumahtangga, penanganan para veteran** perlawanan secara memadai, dan warisan konflik dan pendudukan beberapa dekade – akan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau generasi untuk menyelesaikan. Meskipun, pemerintah dan masyarakat Timor Lorosa'e akan menangani tantangan-tantangan itu, dukungan internasional dan para ahli masih dibutuhkan, semoga semuanya semakin lama menjadi semakin efektif.

## Kesimpulan

Yang disebutkan di atas hanyalah sebagian tantangan yang penting yang menanti Timor Lorosa'e. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan publik maupun rumah-rumah pribadi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya lembaga yang mendampingi Timor Lorosa'e dari wilayah pendudukan melalui penghancuran memasuki masa transisi dan akhirnya mencapai kemerdekaan, dan kami memuji UNTAET atas keberhasilannya dalam menangani tugas yang hampir mustahil ini. Tetapi karena banyak masalah signifikan ketika UNTAET tiba, banyak pula tantangan berat tertinggal pada saat UNTAET pergi. Melalui artikel ini, kami berharap menuliskan pada catatan ringkasan tentang negara Timor Lorosa'e yang sedang menjadi merdeka. Jika keadaan memburuk pada beberapa tahun mendatang, pemerintah Timor Lorosa'e dan rakyat akan sama-sama memikul tanggungjawab, tetapi ada banyak hal yang di luar kontrol mereka (lihat editorial halaman belakang). Tambahan lagi, mereka mewarisi banyak tugas yang tidak bisa dikerjakan atau tidak diselesaikan dari UNTAET, serta penggantinya.

Timor Lorosa'e akan memerlukan bantuan teknik dan keuangan dari masyarakat internasional untuk masa mendatang, dan kami berharap bahwa pelajaran-pelajaran yang ditarik dari tiga tahun ini akan membantu pemerintah di sini maupun badan-badan internasional menerapkannya dengan lebih efisien dan efektif. ❖

# Harus Dilakukan: Keadilan Masih Tertunda

*Oleh Judicial System Monitoring Programme (JSMP)*

Bagian sangat penting dari mandat Dewan Keamanan kepada UNTAET untuk mempersiapkan kemerdekaan wilayah ini adalah “administrasi keadilan” pada masa transisi. Lebih lanjut, Dewan Keamanan meminta agar siapa saja yang bertanggung jawab atas kekerasan di Timor Lorosa’e, terutama selama tahun 1999, diajukan ke pengadilan. Namun, pada akhir misi UNTAET dan pengalihan kekuasaan penuh kepada pemerintah Timor Lorosa’e merdeka, berbagai masalah masih belum diselesaikan.

Dalam laporan terakhirnya kepada Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengakui bahwa Timor Lorosa’e masih harus membangun sistem peradilan yang mampu menangani tindak kekerasan, perselisihan tanah, dan penuntutan pelanggaran berat hak asasi manusia. Ia mencatat bahwa “pada saat ketika kepercayaan rakyat Timor Lorosa’e pada sistem peradilan yang sedang terbentuk itu merupakan sesuatu yang vital”, berbagai masalah telah menghambat efektivitas sistem yang sedang berusaha diciptakan UNTAET.

Anda tak perlu melihat jauh-jauh untuk memahami kekurangan dalam sistem peradilan. Pada bulan Februari dan Maret tahanan di Penjara Becora, Dili memprotes masa penahanan yang panjang menunggu pemeriksaan pengadilan. Dalam beberapa kasus, banyak dari mereka belum diadili, mereka juga tidak memiliki akses pada pengacara. Pengadilan Banding tidak berfungsi karena tidak ada cukup hakim untuk menangani satu perkara banding sekalipun. Kasus-kasus yang ditangani Majelis Hakim Khusus untuk Kejahatan Berat terus-menerus tertunda karena kurangnya perencanaan administrasi dan kurangnya penerjemah dan pembela umum. Pengadilan di Baucau sekali lagi diguncang oleh aksi para staf kehakiman yang prihatin atas masalah keamanan dan sumberdaya. Banyak perselisihan masih ditangani oleh mekanisme tradisional tingkat desa dan sebagian besar penduduk tidak memiliki akses pada informasi tentang sistem peradilan formal.

Jadi apa yang telah dicapai dalam sektor peradilan dan apa saja yang masih harus dilakukan? Lebih jauh, mengapa keadilan terbukti merupakan tugas yang sulit bagi UNTAET? Apakah dasar-dasar yang berkelanjutan telah diletakkan bagi masa depan? Untuk memahami apa yang telah dicapai, penting pertama melihat kembali dasar ketika UNTAET dimulai pada tahun 1999. Sangat sedikit pengacara Timor Lorosa’e yang memenuhi syarat, perginya rezim Indonesia menciptakan kekosongan hukum dalam hal undang-undang yang bisa diterapkan dan mekanisme penegakan hukum, serta prasarana fisik dari suatu sistem peradilan – sebagaimana banyak sektor yang lain – dihancurkan sepenuhnya. Dalam keadaan seperti itu, “menjalankan keadilan” merupakan tantangan yang luar biasa besar, karena pada dasarnya menyangkut pembentukan sistem peradilan baru dari puing-puing kehancuran.

## Apa yang telah dikerjakan ?

Tugas-tugas yang dinyatakan sendiri oleh Departemen Kehakiman dimuat dalam “Fact Sheet” yang dikeluarkan oleh departemen ini pada bulan September 2001, ketika peradilan sedang diserahkan kepada Pemerintah Transisi Kedua. “Fact

Sheet” tersebut menyebutkan bahwa mandat Departemen Kehakiman adalah membentuk sistem peradilan di Timor Lorosa’e yang terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

- √ Sistem pengadilan dua tingkat, yaitu Pengadilan Distrik dan Pengadilan Banding.
- √ Pelayanan Penuntutan, termasuk penuntutan kejahatan-kejahatan biasa maupun kejahatan berat.
- √ Pembela Umum dan Pelayanan Bantuan Hukum
- √ Dinas Penjara

“Fact Sheet” tersebut mencatat bahwa Departemen Kehakiman juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas pelatihan hukum di Timor Lorosa’e serta pelatihan dan pemantauan terhadap hakim, jaksa, pembela umum, panitera pengadilan, dan staf penjara Timor Lorosa’e.

Unsur-unsur itu merupakan ukuran yang berguna untuk menilai apakah UNTAET telah melaksanakan tanggungjawabnya, serta merupakan indikasi bagi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Timor Lorosa’e ketika menerima tanggungjawab penuh atas proses itu. Namun, penting untuk diakui bahwa penyerahan dalam masalah keadilan telah dimulai dan di masa mendatang tetap akan merupakan proses yang setahap demi setahap. Sekalipun

selama Pemerintah Transisi pertama seorang anggota kabinet internasional UNTAET diberi tanggungjawab atas “Urusan Kehakiman,” portofolio Departemen Kehakiman pada kenyataannya diserahkan kepada Menteri Kehakiman Timor Lorosa’e, Dr. Ana Pessoa pada saat pembentukan Pemerintah Transisi kedua pada bulan September 2001.

Keadilan akan terus menerima bantuan internasional yang besar, mencakup banyak pos dalam misi pengganti PBB setelah kemerdekaan. Akan tetapi, dengan selesainya tahap “rehabilitasi,” sudah saatnya memfokuskan pada operasi sistem peradilan itu sendiri dari segi hasil kualitatif dan transparansi serta kejelasan prosesnya. Hanya ketika sistem peradilan memberikan hasil yang adil setelah melalui persidangan yang adil dan proses yang kredibel, kepercayaan orang Timor Lorosa’e pada sistem legal itu menjadi berdasar.

Dari segi pencapaiannya, sekarang ada pengadilan, gedung-gedung pengadilan telah direhabilitasi dan hakim-hakim serta pengacara-pengacara Timor Lorosa’e telah diangkat. Penjara telah dibentuk di Becora, Gleno, dan Baucau, meskipun kondisinya minimum dan bisa saja menurun setelah kemerdekaan. Kebanyakan dari empat Pengadilan Distrik sekarang beroperasi, tetapi tidak begitu lancar dan setiap pengadilan berada pada tingkat perkembangan yang berbeda dengan beban kasus yang juga berbeda. Sumberdaya yang disediakan untuk pengadilan, jaksa, dan pembela, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam menangani beban kasus yang berat. Sekarang ada keprihatinan tentang kurangnya koordinasi dan kurangnya pengarahan menyangkut pengembangan di dalam sistem dan manajemen sistem peradilan. Pada kenyataannya hanya Pengadilan Distrik Dili dan Baucau yang dapat dikatakan berfungsi. Pengadilan Oe-cusse awalnya kekurangan hakim, dan kemudian kekurangan hakim investigasi ketika hakim yang diangkat adalah hakim investigasi. Pengadilan Suai masih



beroperasi di Gedung Pengadilan Dili oleh karena gedung pengadilan Suai baru saja dibangun. Di Baucau berulang-ulang muncul masalah keamanan, termasuk intimidasi terhadap jaksa dan hakim.

Pengadilan Banding sama sekali tidak beroperasi selama beberapa bulan oleh karena kontrak hakim-hakim internasional telah berakhir tanpa perencanaan kontrak baru atau pergantiannya. Sekarang ini tidak ada Ketua Pengadilan Banding. Ketua adalah fungsi yang sangat penting sebab bertanggungjawab atas administrasi seluruh sistem peradilan.

Dalam hal penuntutan, jaksa-jaksa Timor Lorosa'e telah diangkat dan banyak kasus sedang bergerak di dalam sistem peradilan. Namun, jumlah kasus melebihi kemampuan lembaga kejaksaan yang begitu kecil. Hal ini menyebabkan berbagai kasus tertunda atau diselesaikan melalui praktek mekanisme hukum "tradisional." Sementara UNTAET tidak memiliki keinginan untuk menghadapi kompleksitas prosedur penyelesaian sengketa informal yang ada di Timor Lorosa'e, kekhawatiran dari segi hak asasi manusia telah disampaikan sehubungan dengan penyelesaian kasus-kasus menurut mekanisme tradisional, termasuk kasus kejahatan kekerasan atau perkosaan. Kurangnya pedoman untuk para jaksa dan hakim telah berarti inkonsistensi dan praktek-praktek ad hoc telah berkembang yang merusak standar hak asasi manusia yang dipromosikan PBB, termasuk hak atas pengadilan yang adil dan persamaan di hadapan hukum. Misalnya, sejumlah pengadilan dimulai tetapi kemudian "menghilang" dalam sistem, seperti kasus kekerasan dalam rumahtangga yang melibatkan Sergio Lobo, seorang dokter terkenal.

### **Kejahatan Berat**

Penuntutan kejahatan serius mendapat perhatian yang cukup besar dari misi UNTAET. Sampai hari ini, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan lebih dari 35 dakwaan terhadap sekitar 100 orang. Walaupun beberapa orang telah didakwa, tidak satupun anggota tentara Indonesia yang berada di dalam tahanan, sekalipun UNTAET telah menyampaikan sejumlah surat perintah penangkapan kepada INTERPOL dan pihak yang berwenang di Indonesia. Dalam 15 kasus yang telah diputuskan, pengadilan hanya menghukum 23 terdakwa, tidak ada kasus bebas murni dan 2 orang dibebaskan karena alasan prosedural atau dasar yurisdiksi pengadilan.

Memang ini merupakan pencapaian besar dari standar apa pun, khususnya jika dibandingkan dengan proses lamban ICTY (Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia) dan ICTR (Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda). Namun, perbandingan semacam itu sama sekali tidak sesuai ketika kita memperhatikan perbedaan dasar dalam hal tipe kasus yang telah disidangkan. Hampir semua kasus yang diadili oleh Majelis Hakim Khusus adalah kasus yang relatif sederhana, yang melibatkan pembunuhan tunggal yang diadili dengan Hukum Pidana Indonesia dengan satu orang terdakwa dan beberapa saksi yang didengar. Tidak ada saksi yang meringankan yang telah didengar pada pengadilan kejahatan berat. Semua terdakwa yang diadili adalah orang Timor Lorosa'e, kebanyakan dari mereka anggota milisi tingkat rendah, umumnya petani-petani yang tidak bisa baca-tulis, yang mengaku terlibat pada peristiwa kejahatan yang diadili tetapi umumnya mengatakan bahwa mereka dipaksa atau diperintah menjadi anggota milisi dan terlibat dalam kejahatan. Seringkali mereka bukanlah pelaku utama, sedang para pelaku utamanya kini berada di Indonesia.

Selain masalah administratif dan sumberdaya yang

mempengaruhi seluruh sistem peradilan, tantangan yang kemungkinan paling penting bagi efektivitas Majelis Hakim Khusus adalah ketidakmampuan jaksa-jaksa untuk menghadapi ke pengadilan para perencana dan pelaku utama pelanggaran terberat hak asasi manusia, karena hal ini tergantung pada kerjasama dari Indonesia. Sekalipun suatu Memorandum Kesepahaman telah ditandatangani oleh Jaksa Agung Indonesia dan UNTAET pada tanggal 5 April 2000 mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kerjasama di bidang hukum, kehakiman, dan hak-hak asasi manusia, Indonesia menolak memenuhi berbagai permintaan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat. UNTAET telah dikritik karena tidak melakukan tekanan politik yang cukup terhadap Indonesia dalam hal ini, dan tidak diragukan lagi bahwa pemerintah Timor Lorosa'e merdeka akan jauh kurang mampu untuk jika dibandingkan dengan gabungan kekuatan dan pengaruh komunitas internasional melalui PBB.

Lagi pula, manajemen internal dan masalah sumberdaya dialami para penyelidik dan jaksa Unit Kejahatan Berat pada masa awal yang sangat penting dan menentukan dalam tugasnya. Banyak dari masalah ini telah diatasi dalam beberapa bulan ini, tetapi jika telah ditangani sebelumnya, pengadilan mungkin saja akan menghadapi tumpukan kasus yang lebih banyak karena persoalan-persoalan administratif yang diuraikan di atas. Namun, Unit Kejahatan Berat (SCU) masih menghadapi masalah kehilangan kredibilitas yang disebabkan oleh persoalan-persoalan sebelumnya. Misi PBB pengganti akan mencakup pendanaan dan staf untuk SCU sekurangnya sampai pertengahan 2003. Kebanyakan dari 10 kasus "prioritas" yang pada awalnya diumumkan akan menjadi fokus SCU sekarang memasuki tahap penyusunan dakwaan. SCU juga menangani kasus-kasus yang tersangkanya sudah ada dalam tahanan, dan juga akan menyelidiki kasus-kasus lain yang berhubungan dengan para pengungsi yang pulang dari Timor Barat. Konstitusi baru juga membuat ketentuan untuk Majelis Hakim Khusus untuk Kejahatan Berat agar menyelesaikan tugasnya, tapi tidak jelas jangka waktunya.

### **Apa yang masih harus dikerjakan?**

Kantor pembela umum dan komisi bantuan hukum masih termasuk di antara tugas-tugas berat yang ada di sektor peradilan. Kecilnya jumlah pembela umum tidak bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang berada di tahanan yang jumlahnya semakin membengkak, yang kebanyakan melakukan tindak pidana ringan. Akibatnya bukan sekadar masa penahanan yang panjang sebelum pengadilan, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang-orang yang disangka melakukan kejahatan, yang kebanyakan dari mereka tidak mengerti prosedur hukum. Para pembela umum mendapatkan latihan yang sangat minim dan bekerja dalam kekacauan kelembagaan, sementara nasib lembaga mereka sedang diperdebatkan antara UNTAET yang hampir selesai tugasnya dengan Departemen Kehakiman Timor Lorosa'e.

Hukum mana yang berlaku masih merupakan masalah yang belum diputuskan. Nampaknya UNTAET meninggalkan untuk pemerintah Timor Lorosa'e mendatangi keputusan tentang kebijakan yang sulit tentang rezim legal apa yang harus diterapkan. Malah sebaliknya, didirikan sebuah rezim legal peralihan yang melanjutkan hukum Indonesia, yang harus tunduk pada standar hukum hak asasi internasional dan regulasi-regulasi UNTAET. Sementara hal ini mempermudah peralihan para hakim dan pengacara tamatan Indonesia untuk memasuki profesi

baru mereka, para pejabat administrasi transisi yang berwenang sangat lamban dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang Indonesia yang tidak sesuai dengan sumber-sumber hukum yang lain. Selain itu, terjemahan dan penyebaran regulasi UNTAET yang kurang memadai juga merupakan masalah. Bidang-bidang hukum lain yang penting, termasuk regulasi tentang perusahaan dan klaim atas tanah dan harta-benda sama sekali belum dibuat. Ketidakpastian dalam bidang yang sangat penting itu berpotensi untuk tidak hanya memperparah ketegangan di dalam wilayah Timor Lorosa'e, tetapi juga bisa menimbulkan masalah-masalah ekonomi dan sosial lainnya, termasuk korupsi.

Walaupun Konstitusi baru menetapkan struktur peradilan yang lain dari struktur transisional yang diciptakan oleh UNTAET, kemungkinan diperlukan waktu beberapa tahun agar sistem yang baru bisa dilaksanakan. Dalam pada itu, beberapa aspek dari sistem pengadilan sedang diupayakan untuk dapat bekerja pada tingkat administratif. Pelatihan kemampuan staf orang Timor Lorosa'e dihambat oleh kurangnya kemampuan staf internasional yang direkrut sebagai mentor. Dalam hal apa yang harus dikerjakan, daftarnya panjang. Beberapa aspek dapat diatasi secara mudah dengan dukungan yang benar, lainnya lebih kompleks dan memerlukan banyak waktu untuk dapat diatasi. Sementara UNTAET telah membuat beberapa langkah perbaikan yang penting dalam bulan-bulan belakangan, jelas bahwa untuk beberapa lama sistem peradilan masih akan tergantung pada bantuan.

Tentu saja, keadilan untuk Timor Lorosa'e itu lebih daripada pengembangan sistem peradilan formal. Di dalam Timor Lorosa'e, keadilan adalah bagian penting untuk proses

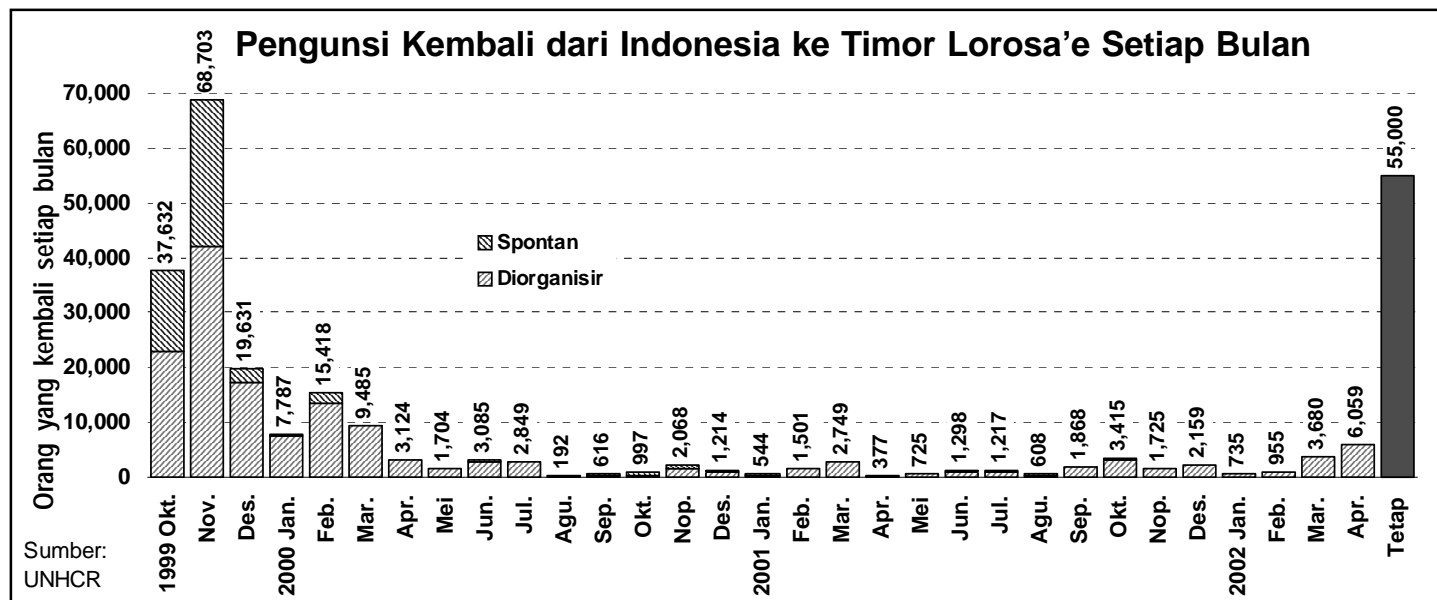
rekonsiliasi yang sedang berjalan. Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi telah dibentuk, tetapi belum menerima semua dana yang dibutuhkan. Keberhasilan Komisi ini juga tergantung pada faktor-faktor yang tak bisa diduga, seperti jumlah pengungsi yang kembali dari Timor Barat, sejauh mana komunitas mau terlibat, dan apakah sistem peradilan formal mampu dengan baik memproses kasus-kasus berat. Sama halnya, keadilan untuk kejahatan yang dilakukan di Timor Lorosa'e tetap sulit didapatkan di luar wilayah Timor Lorosa'e. Meskipun beberapa kasus diadili oleh Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta, banyak pertanyaan tentang apakah pengadilan ini bisa memberikan hasil yang adil, karena iklim politik dan terbatasnya yuridiksi pengadilan ini. (Lihat Berita Ringkas halaman 18).

Yang menjadi kekhawatiran besar adalah menurunnya dukungan internasional untuk keadilan di Timor Lorosa'e, seperti yang diperlihatkan baru-baru ini oleh pernyataan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, yang secara diplomatik memuji usaha-usaha Indonesia. Para perencana tingkat tinggi dan pelaku utama kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Timor Lorosa'e sejak tahun 1975 hingga 1999 harus dihadapkan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka – baik melalui suatu mekanisme internasional yang menyeluruh maupun melalui kerjasama dengan upaya-upaya nasional di dalam wilayah Timor Lorosa'e. Kekebalan hukum (*impunity*) untuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan perusakan besar-besaran yang membuat Timor Lorosa'e berada pada posisi ekonomi dan sosial yang paling parah pada saat kemerdekaan itu tidak bisa diterima. ❖

## Harus Dilakukan: 55.000 Orang Timor Lorosa'e Masih Tertahan di Indonesia

Salah satu konsekuensi dari penghancuran 1999 yang paling merugikan Timor Lorosa'e adalah terusirnya 2/3 rakyat Timor Lorosa'e, banyak dari mereka lari ke Indonesia. Kembalinya mereka secara aman dan sukarela menjadi salah satu prioritas tertinggi UNTAET. Ini memang pantas, sebab penculikan dan pemindahan paksa mereka oleh tentara Indonesia dan milisi dapat terjadi karena komunitas internasional tidak mau bertindak berdasarkan informasi-informasi yang mereka miliki bahwa operasi penghancuran semacam itu akan dijalankan jika rakyat Timor Lorosa'e memilih merdeka.

Sekitar 300.000 orang Timor Lorosa'e meninggalkan kota-kota menuju pegunungan negeri mereka, di mana mereka bertahan hidup selama tiga minggu dalam keadaan yang paling sulit sebelum tekanan internasional dan InterFET memberikan keadaan yang aman untuk mereka kembali ke lingkungan masing-masing yang sudah dihancurkan. Selain kedatangan yang terlambat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai badan bantuan kemanusiaan menangani pengungsian dalam negeri itu dengan sangat baik, dan rakyat Timor Lorosa'e cukup tabah dan banyak akal untuk mengatasi sangat banyak kesalahan yang



selalu menyertai operasi penanganan krisis. Dengan perkecualian program bantuan tempat berlindung UNHCR (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 1, No. 2 dan Vol. 1, No.4; masalah yang kami bahas pada tahun 2000 itu masih berlangsung, dan sekitar 25% dari 35.000 tempat berlindung masih belum memiliki dinding), di bidang ini UNTAET bekerja dengan baik.

Sayang sekali, kita tidak dapat mengatakan yang sama untuk orang-orang yang dipaksa diangkut dengan kapal dan truk ke Timor Barat dan bagian-bagian lain Indonesia. Meskipun UNTAET merayakan pemulangan 200.000 orang "pengungsi" pada bulan April, lebih dari 55.000 orang Timor Lorosa'e masih terpaksa berada di Indonesia, banyak kini hidup dalam kamp-kamp pengungsi yang jorok yang mereka tinggal lebih dari dua tahun ini. Orang Timor Lorosa'e lainnya, termasuk lebih dari 1.200 anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka, ditahan atau terdampar di Jawa atau bagian-bagian lain Indonesia, tanpa strategi UNTAET yang efektif untuk mengembalikan mereka.

Pada bulan Juli 2001, *La'o Hamutuk* mempertanyakan pendekatan UNTAET bernegosiasi dengan pemimpin-pemimpin milisi (banyak dari mereka adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan) untuk kepulangan orang-orang yang sebenarnya menjadi sandera mereka (lihat *Buletin La'o Hamutuk*, Vol. 2, No. 4). Administrator Transisi berbeda pandangan dengan analisis kami, dan kami memuat jawabannya dan tanggapan kami pada Oktober lalu (*Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2, No. 6-7). Pada saat itu, pengungsi yang kembali dari Timor Barat diperkirakan rata-rata 1.000 orang per bulan dan akan dibutuhkan waktu enam tahun agar semua pulang.

Mendekati akhir 2001, orang yang kembali meningkat dua kali lipat, akibat dari pemilihan lembaga legislatif yang berjalan damai dan pembentukan pemerintah baru di Timor Lorosa'e, dan juga karena keluarga-keluarga mau bersatu pada saat Natal. Beberapa ratus orang kembali sebagai hasil perundingan dengan pemimpin milisi Nemezio de Carvalho tetapi hasil akhir dari taktik perundingan dengan milisi itu negatif, karena meningkatkan kekuatan para pemimpin milisi untuk menahan

para pengungsi di Timor Barat.

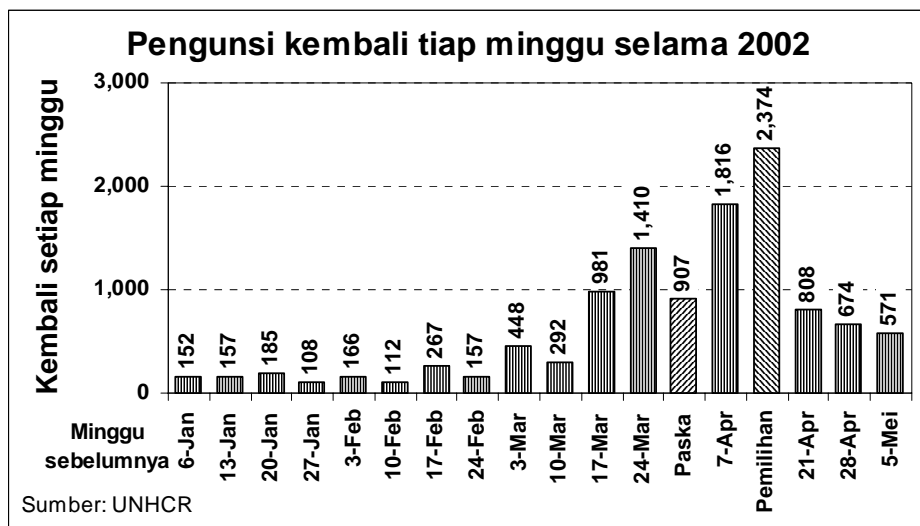
Pada pertengahan Januari, pejabat UNTAET yang menangani perundingan dengan pemimpin milisi mengundurkan diri, dan sejak itu UNTAET meninggalkan taktik ini dan bekerja lebih dekat dengan kelompok-kelompok komunitas. Pada bulan Januari dan Februari orang yang pulang sangat berkurang, tetapi banyak pengungsi pulang untuk merayakan hari raya Paskah 31 Maret bersama keluarga atau mengikuti pemilihan presiden tanggal 14 April (lihat grafik). Hal ini dipercepat oleh berakhirnya bantuan pada bulan Januari, persediaan makanan banyak pengungsi habis pada bulan Maret, sekitar akhir musim tanam.

Gelombang pemulangan didukung oleh situasi yang semakin aman di sini dan oleh para pemimpin Timor Lorosa'e, khususnya Xanana Gusmão, yang secara aktif mendekati pengungsi di tingkat bawah. Pihak berwenang Indonesia, termasuk TNI di Timor Barat membantu orang untuk kembali, yang dengan demikian membuat pengaruh pimpinan milisi semakin menurun. Di Timor Barat banyak orang Timor Lorosa'e yang percaya bahwa jika mereka tidak berada di kampung halaman sebelum kemerdekaan, mereka tidak akan diterima dengan baik, oleh karena itu mereka memutuskan untuk pulang sekarang. Pada saat tulisan ini ditulis, tidak jelas berapa pengungsi yang akan pulang setelah kemerdekaan, tetapi kami berhati-hati terhadap perkiraan yang optimis yang di masa lalu lebih banyak keliru.

*La'o Hamutuk* menyambut baik peningkatan orang yang pulang dari pengungsian dan mendorong para pemimpin Timor Lorosa'e dan badan-badan internasional untuk melanjutkan tugas mereka. Para ahli memperkirakan bahwa sekurangnya 40.000 dari 55.000 yang masih di Timor Barat ingin kembali ke kampung halaman, dan bahwa setengah dari mereka itu sedang menunggu uang pensiun dari pemerintah Indonesia (usaha untuk mendapatkan uang ini dipersulit oleh kurangnya komitmen dari pemerintah Indonesia). Puncak kepulangan bulan April akan berlalu, tetapi sekalipun tingkat kepulangan pada paruh kedua bulan April (sekitar 2.800/bulan) berlanjut, akan diperlukan lebih

dari satu tahun bagi pengungsi yang tertinggal untuk kembali. Kami juga prihatin atas menurunnya tekanan internasional terhadap Indonesia, yang diisyaratkan oleh pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang tidak bergigi, tentang rencana pengurangan kehadiran UNHCR dan IOM pada pertengahan 2002, dan tentang ancaman Indonesia untuk menutup kamp-kamp dan menyebarkan para pengungsi yang masih ada.

"Persoalan pengungsi" menghambat 7% orang Timor Lorosa'e untuk menjadi merdeka pada tanggal 20 Mei. Pengungsi masih menjadi tanggungjawab masyarakat internasional, sebagai salah satu tugas Administrator Transisi yang belum diselesaikan. ❖



### Siapa itu La'o Hamutuk?

**La'o Hamutuk staf:** Thomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvenal, Inês Martins, Adriano do Nascimento, Benedict Rogers, Charles Scheiner, Pamela Sexton, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

**Penerjemah:** Selma Hayati, Titi Irawati, Djoni Ferdiwijaya, Tomé Xavier Jeronimo, Salar Kossi, Endah Pakaryaningsih

**Dewan Penasehat:** Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares

*La'o Hamutuk* berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.



# Apa di Balik Bantuan Cina Untuk Timor Lorosa'e?

Cina, negara dengan penduduk terbesar di dunia, telah menjadi donor bilateral yang penting untuk Timor Lorosa'e selama dua tahun terakhir, dan menurut Unit Koordinasi Donor UNTAET, mungkin urutan 12 terbesar. Sejauh ini Cina telah menyumbangkan kira-kira \$10 juta, jauh dibandingkan Jepang (\$116 juta) dan Portugal (\$85 juta), tetapi mendekati donor-donor utama lain seperti Inggris dan beberapa negara Skandinavia.

Bantuan Cina untuk Timor Lorosa'e terpusat pada penyediaan peralatan pertanian dan perikanan, pelatihan untuk para ahli ekonomi, dan sebuah perjanjian untuk membangun gedung baru untuk Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Timor Lorosa'e.

Menurut kepala perwakilan diplomatik Cina di Timor Lorosa'e, Shao Guanfu, Cina telah mendukung hak Timor Lorosa'e untuk menentukan nasib sendiri di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak invasi Indonesia pada tahun 1975. Cina memandang proses kemerdekaan sebagai "kelanjutan dekolonisasi Timor Lorosa'e." Cina mendukung dekolonisasi koloni-koloni Portugis lainnya dan selalu mendukung resolusi-resolusi Majelis Umum PBB tentang Timor Lorosa'e. Cina membantu biaya untuk Pasukan Penjaga Perdamaian dan pada tahun 1999 memberikan dua bantuan kecil untuk bantuan darurat kemanusiaan. Cina, kata Shao, sedang berupaya membangun hubungan bilateral dengan Timor Lorosa'e dalam bidang "politik, ekonomi, dan perdagangan."

Pada bulan Januari 2000, pemimpin Timor Lorosa'e Xanana Gusmão dan Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta mengunjungi Beijing, yang menghasilkan sebuah kesepakatan tentang kerjasama ekonomi dan teknik pada bulan Juli 2000 untuk peralatan pertanian dan perikanan yang bernilai \$6 juta, yang meliputi:

- √ 67 kontainer melalui laut yang berisi lebih dari 200 mesin pertanian: traktor, alat penggali, bajak, mesin penabur bibit, dan trailer.
- √ 72 kontainer peralatan perikanan termasuk 300 mesin perahu, 15 kontainer pipa listrik, 1.500 panel jala untuk menangkap ikan, 3 ton tali kail, boks es penyimpanan ikan, dan baju pelampung, yang semuanya tiba pada bulan Juli 2001.
- √ 100.000 jaring nilon kelambu nyamuk.
- √ Cina juga mengirimkan lima orang teknisi untuk membantu merakit alat-alat pertanian dan melatih orang Timor Lorosa'e tentang bagaimana memelihara mesin-mesin tersebut.

Cina tidak memberikan bantuan uang tunai untuk Timor Lorosa'e, tetapi Unit Koordinasi Donor UNTAET menganggap bantuan mereka merupakan bantuan peralatan yang terbesar. Pengiriman pertama dikirim ke CNRT, tetapi kemudian digabungkan dengan rencana distribusi Departemen Pertanian dan dikirim ke seluruh distrik.

Bantuan Cina terbesar kedua berupa sebuah janji yang ditandatangani pada bulan Maret 2001, kira-kira \$4 juta untuk membangun gedung Kenterian Urusan Luar Negeri dan Kerjasama. Shao mengatakan bahwa studi kelayakan telah selesai dibuat dan disainnya sedang dikerjakan, tetapi tempatnya belum ditetapkan dan tidak ada "jadwal waktu yang pasti" untuk penyelesaiannya. Cina akan melakukan tender untuk kontraktor-kontraktor Cina, dan akan menyediakan bahan material dan teknisi apa saja yang dibutuhkan Timor Lorosa'e, tetapi Shao mengatakan bahwa kerja konstruksi akan "menggunakan sebagian besar tenaga kerja dan bahan lokal."

Departemen Ekonomi dan Pembangunan juga menerima bantuan Cina. Dari bulan Juni sampai Agustus 2001, empat belas ahli ekonomi Timor Lorosa'e pergi ke Beijing untuk mengikuti pelatihan, dan sejumlah lainnya akan pergi pada tahun ini. Tetapi seorang pegawai UNAET menyatakan keprihatinan umum bahwa tidak ada kantor khusus yang mencocokkan kesempatan-kesempatan pelatihan di luar negeri, dan bahwa Cina tidak terkait dengan Unit Koordinasi Pengembangan Kapasitas.

Cina juga berencana mengirimkan sebuah tim dokter spesialis untuk bekerja di Rumah Sakit Nasional Dili. Tim ini bisa mencakup spesialis kedokteran tradisional Cina. Cina juga pernah mengirim tim medis

seperti ini ke Moçambique di masa lalu.

Sebagai pelengkap untuk program bantuannya, Cina telah membuka misi diplomatik yang terdiri dari lima orang di Dili, yang terletak dalam kompleks yang luas di kawasan Farol. Menteri Luar Negeri Cina Tang Jiaxuan akan memimpin delegasi Cina pada perayaan kemerdekaan 20 Mei. Shao mengatakan bahwa Cina akan melanjutkan bantuannya kepada Timor Lorosa'e, terutama di bidang pertanian, kesehatan, dan pendidikan, "sesuai dengan kapasitas yang kami miliki."

Perhatian Cina di Timor Lorosa'e telah memunculkan berbagai spekulasi tentang motivasinya. Unit Koordinasi Donor tidak memandang Cina sebagai donor "tradisional" dan Cina sendiri merupakan negara yang menerima bantuan internasional. Di antara negara-negara berkembang, Cina adalah donor terbesar untuk Timor Lorosa'e.

Ada beberapa kemungkinan alasan bagi perhatian Cina kepada Timor Lorosa'e. Pertama, Cina secara umum menjalankan kebijakan yang meningkatkan keterlibatannya di tingkat regional dan internasional, dalam upaya untuk mengangkat ketokohan dan pengaruh Cina, termasuk keamanan dan kerjasama regional. Tambahan lagi, Cina memiliki kepentingan khusus untuk mempengaruhi Timor Lorosa'e agar tidak menjalin hubungan dekat dengan Taiwan (yang pemerintahnya tetap mengakui dirinya sebagai pemerintah daratan Cina, meskipun kenyataannya telah melarikan diri lebih dari 50 tahun lalu), walaupun Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta memiliki persahabatan pribadi dengan politikus-politikus kemerdekaan Taiwan. Tampaknya Cina telah memperoleh kerjasama dari Timor Lorosa'e. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Timor Lorosa'e mengatakan kepada *La'o Hamutuk* bahwa Taiwan tidak memiliki perwakilan di Timor Lorosa'e, karena Timor Lorosa'e akan mengadopsi "kebijakan satu Cina."

Menurut Shao, sebuah "kebijakan satu Cina" memiliki tiga unsur: pengakuan bahwa hanya ada satu Cina, bahwa Republik Rakyat Cina adalah satu-satunya wakil sah Cina, dan bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Cina. Sebagian besar negara di dunia ini mengadopsi kebijakan ini. Namun, banyak pemerintah dengan kebijakan ini juga memelihara hubungan-hubungan tidak resmi dan perdagangan dengan Taiwan dan beberapa memiliki perwakilan dagang di Taiwan tanpa menjalin hubungan diplomatik resmi.

Shao mengatakan bahwa Cina menganggap "berkewajiban" untuk membantu rakyat Timor Lorosa'e. "Cina dan Timor Lorosa'e adalah sama-sama negara Asia dan tetangga dekat. Kita sama-sama negara berkembang. Kepentingan kami adalah membangun dan bekerjasama," katanya. Tambahan lagi, mendukung kesatuan nasional dan stabilitas Timor Lorosa'e adalah "konduif bagi semua orang." Menjamin dukungan Timor Lorosa'e bagi kebijakan Cina atas Taiwan bukanlah motivasi yang khusus, kata Shao, melainkan merupakan hasil yang alamiah dari hubungan timbal balik. "Semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Cina memiliki kebijakan satu Cina. Kami menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Timor Lorosa'e. Pada saat yang sama ... setiap negara yang akan membangun hubungan diplomatik dengan Cina harus menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Cina." Namun, harus dicatat bahwa Cina dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia di Tibet, serta menolak hak rakyat Tibet untuk menentukan nasib sendiri. Tibet tidak memiliki status di PBB seperti Timor Lorosa'e, tetapi ada persamaan antara cara Cina memperlakukan orang-orang Tibet dengan Indonesia memperlakukan orang-orang Timor Lorosa'e selama pendudukan. Di masa lalu, sejumlah pemimpin Timor Lorosa'e menunjukkan solidaritas dengan rakyat Tibet.

Pertanyaan yang akan terus diajukan: mengapa Cina memberikan bantuan seperti itu? Mengapa Cina memiliki misi yang begitu besar? Apa yang diharapkan Cina dari kehadirannya di Timor Lorosa'e? Seberapa besar pengaruh yang akan dimiliki Cina terhadap Pemerintah Timor Lorosa'e? Hanya waktu yang akan memberi tahu kita. ❖



# Gender, Kekuasaan, Pemberdayaan, dan Perubahan Sosial Pertukaran Bersama Aktivis dari Nicaragua

Pada bulan Maret dan April lalu, *La' o Hamutuk* telah bekerjasama dengan organisasi-organisasi Timor Lorosa'e lainnya menyelenggarakan sebuah "intercambio" atau pertukaran dengan dua aktivis dari Nicaragua: Madlyn Centeno West dari Jaringan Perempuan Anti-Kekerasan dan Ruben Reyes dari Asosiasi Laki-laki Menentang Kekerasan.

Sambil memantau dan menganalisa peran lembaga-lembaga internasional di Timor Lorosa'e, *La' o Hamutuk* juga melihat kebutuhan akan model-model pembangunan alternatif. Pertukaran internasional adalah satu cara untuk membangun hubungan solidaritas internasional yang kuat dan bersama-sama mengembangkan dan inisiatif-inisiatif yang baru dan kreatif. Pada tahun 2001, *La' o Hamutuk* menyelenggarakan pertukaran antara organisasi-organisasi Timor Lorosa'e dan Brazil yang terlibat dalam pendidikan populer. Tahun ini, pertukaran kami terfokus pada gender dan menguji bagaimana gender dikonstruksikan secara sosial dan berbasis pada hubungan-hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, dan bagaimana hal ini terkait dengan sistem patriarkal, kekerasan terhadap perempuan, dan langkanya pilihan-pilihan perkembangan untuk perempuan.

Budaya patriarkal tradisional sangat kuat di Timor Lorosa'e. Sampai saat ini, perempuan sangat kurang bersuara di publik dan diskusi-diskusi tentang hak-hak perempuan dan masalah-masalah kekuasaan seputar gender terbatas pada kelompok-kelompok kecil perempuan. Dua puluh empat tahun pendudukan militer Indonesia yang sangat represif, yang berlangsung dengan kekerasan terhadap perempuan secara sistematis dan terus-menerus, meninggalkan luka yang dalam bagi bangsa ini. Ratusan tahun kolonialisme Portugis dan Gereja Katolik yang sangat konservatif memperkuat budaya dominasi laki-laki dan kepatuhan perempuan. Saat ini, ketika Timor Lorosa'e membangun kembali dan memajukan dirinya sebagai bangsa yang baru dan merdeka, laporan tentang terjadinya kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam.

Banyak organisasi dan aktivis Timor Lorosa'e telah mulai melakukan pendalaman analisis peran gender, patriarki, feminisme/pembebasan perempuan. Sejak awal 1975, di bawah kepemimpinan Rosa Muki Bonaparte, Organisação Popular da Mulher Timorese (OPMT) melancarkan berbagai program bagi kaum perempuan untuk "menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan." Dan sejak awal, mereka melibatkan kaum laki-laki dari gerakan kaum pemuda populer dalam kegiatan pengasuhan anak di *creches*. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut tidak berlangsung lama karena pendudukan militer Indonesia, tetapi warisan ini tidak hilang dan sekarang sedang dibangkitkan kembali. Banyak organisasi sangat berhasrat untuk mengembangkan alat-alat untuk memberdayakan perempuan di tingkat basis dan melibatkan laki-laki untuk memperjuangkan keadilan gender.

Nicaragua adalah sebuah negara kecil di Amerika Tengah yang juga seperti Timor Lorosa'e, selama berabad-abad mengalami kolonialisme dan baru saja memperoleh kebebasan setelah beberapa dasawarsa perang menentang kediktatoran militer yang mendapat dukungan dari dunia internasional. Pada tahun 1979, gerakan rakyat Sandinista berhasil menggulingkan kediktatoran Somoza yang korup, dan pemerintah yang baru di bawah Sandinista kemudian memimpin program nasional rakyat yang diarahkan pada pemberantasan buta huruf, pelayanan

kesehatan, dan memajukan tanaman pertanian dalam negeri. Tetapi, pada akhir tahun 1980, milisi yang didukung Amerika Serikat (*contras*) melancarkan perang terhadap pemerintah Sandinista. Perang yang berlangsung selama sepuluh tahun telah menghancurkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian serta membuat rakyat terpecah belah dan menderita. Sandinista dikalahkan dalam pemilihan umum, namun mereka tetap memainkan peranan politik yang penting di negara ini.

Selama lebih dari 25 tahun, gerakan perempuan telah menjadi kekuatan yang besar dan aktif di Nicaragua. Selama Revolusi Sandinista, gerakan perempuan aktif dalam banyak program Revolusi, seperti program pemberantasan buta huruf, pendidikan gratis bagi orang dewasa, program nasional imunisasi bagi anak-anak, serta mengorganisasi sukarelawan untuk memanen kopi dan kapas. Selama 10 tahun terakhir gerakan perempuan telah memimpin program nasional yang sangat progresif untuk kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pada tahun 1993, suatu organisasi nasional bernama Asosiasi Laki-laki Menentang Kekerasan dibentuk untuk mendukung gerakan perempuan dan melibatkan laki-laki melawan kekerasan terhadap perempuan. Seperti kebanyakan pelaku kekerasan, penting bagi laki-laki untuk menilai kembali keyakinan-keyakinan mereka dan praktek-praktek serta bekerja menentang kekerasan berbasis gender. Asosiasi Laki-laki Menentang Kekerasan bekerja untuk meningkatkan kesadaran laki-laki dan menghasilkan perubahan sikap dan perilaku patriarkal.

Pertukaran yang diselenggarakan *La' o Hamutuk* itu mengundang dua aktivis dari gerakan Nicaragua tersebut ke Timor Lorosa'e. Acara ini diatur dalam sebuah lokakarya selama tiga minggu, bertempat di Dili, Baucau dan Oecusse, yang mengarahkan peserta untuk menilai gender sebagai dinamika kekuasaan yang kompleks di mana laki-laki berada pada posisi sebagai pemegang kekuasaan. Hanya dengan memandang gender sebagai dinamika kekuasaan sosial maka kita dapat melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah sosial. Lokakarya yang melibatkan lebih dari 20 organisasi dari 8 distrik ini, menggunakan teknik kreatif berbasis metodologi pendidikan populer.

Peserta lokakarya, baik laki-laki maupun perempuan, saling berbagi pengalaman dan keyakinan mereka tentang penindasan berbasis gender. Melalui dialog dan refleksi, peserta menemukan perspektif baru dan komitmen bersama. Pada akhir pertemuan, sebuah kelompok yang terdiri dari hampir 40 aktivis dari 15 organisasi merencanakan sebuah Kampanye Nasional Menentang Kekerasan Berbasis Gender, selama 5 tahun. Peserta perempuan memutuskan terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga di Timor Lorosa'e, yang mendukung kampanye nasional. Peserta laki-laki merencanakan untuk melibatkan lebih banyak laki-laki dalam kegiatan penting ini bagi keadilan gender, dan mengembangkan materi-materi kampanye, dengan laki-laki pelaku tindak kekerasan sebagai targetnya. Dengan memperkuat jaringan perempuan, mengembangkan pertanggungjawaban laki-laki dan keterlibatan dalam kegiatan keadilan gender serta menjalankan sebuah rencana yang jelas sebagai partner, kita dapat menjamin hak asasi dan partisipasi perempuan yang utuh di Timor Lorosa'e baru dan merdeka. ❖

## Berita Singkat...

**Pemerintah Indonesia memulai pengadilan hak asasi manusia** pada 14 Maret untuk mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan kekejaman yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI) dan kelompok-kelompok milisi di Timor Lorosa'e. Kewenangan pengadilan Jakarta dibatasi pada kejadian yang terjadi pada bulan April dan September 1999 dan hanya tiga distrik dari 13 distrik di Timor Lorosa'e. Sementara berbagai pemerintah yang berteman baik dengan Jakarta menyambut gembira permulaan pengadilan yang lambat dan lama itu, pengacara hak asasi manusia bersikap jauh lebih kritis. "Terlalu banyak lubang besar yang dapat menghambat efektivitas pengadilan itu, seperti kemampuan para hakim, hukumnya sendiri, serta kemandirian hakim dari unsur-unsur kekuasaan," kata Hendaridi, ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Sejauh ini, banyak sekali tertuduh dan saksi yang tidak muncul di persidangan. Sementara itu, kehadiran anggota-anggota milisi dan pejabat-pejabat militer tingkat tinggi di ruang pengadilan merupakan tindakan intimidasi. Para pejabat militer telah memanfaatkan persidangan untuk menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pemerintah Habibie atas terjadinya teror pada tahun 1999. Mereka mengatakan bahwa TNI telah berusaha keras menciptakan perdamaian antara kelompok bersenjata pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia di wilayah Timor Lorosa'e, dan sesungguhnya telah menyelamatkan ribuan nyawa personil PBB.

**Pada tanggal 3 April, Wakil Menteri Kesehatan Timor Lorosa'e, João Martins, dan kepala UNTAET, Sergio Vieira de Mello memulai program pendidikan nasional mengenai HIV/AIDS.** Menurut Martins, infeksi HIV di Timor Lorosa'e mencapai 0.64% pada penduduk usia produktif, dibandingkan lebih dari 1 persen di negara-negara terdekat seperti Kamboja dan Thailand. Martins memperingatkan bahwa pergeseran sosial besar-besaran, lalu-lintas penduduk antar perbatasan, pengangguran yang tinggi, buta huruf di pedesaan, rendahnya kesadaran mengenai HIV dan penyakit yang menular melalui hubungan seksual lainnya bisa memperparah sebaran penyakit ini. Kementerian Kesehatan Timor Lorosa'e melaporkan tiga kasus pertama infeksi HIV/AIDS yang tercatat pada 26 Desember 2001. Kehadiran pasukan penjaga perdamaian dan orang internasional lainnya menjadi sebab utama meningkatnya industri seks di Timor Lorosa'e, sehingga memperbesar meluasnya penyakit ini.

**Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia mengadakan pembicaraan di Jakarta** pada tanggal 24-25 April dengan tujuan membangun kembali hubungan militer yang terhenti ketika terjadi teror oleh TNI-milisi pada September 1999. Pembicaraan dilaporkan terpusat pada kontra-terorisme, pembajakan laut, dan kontrol sipil terhadap TNI. Pemerintahan Bush, bersama dengan Pentagon dan sejumlah sekutu di Kongres Amerika Serikat berkeinginan kuat untuk membangun kembali hubungan, termasuk penjualan senjata dan latihan militer. Washington dan Jakarta telah menggunakan apa yang disebut perang melawan terorisme sebagai alasan untuk memulihkan kembali hubungan militer secara utuh. Pemerintahan Bush telah meminta Kongres untuk menyediakan \$8 juta untuk melatih unit kontra-terorisme yang dipimpin oleh sipil yang akan mencakup tentara Indonesia dan \$8 juta lainnya untuk melatih tentara Indonesia agar bisa menangani kekerasan komunal dengan lebih baik. Namun, banyak anggota Kongres menentang tekanan itu, sambil

mendesak Indonesia agar menjamin pertanggungjawaban bagi kejahatannya di Timor Lorosa'e. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan solidaritas Timor Lorosa'e di Amerika Serikat berupaya menghalangi pemulihan hubungan militer dengan Indonesia.

Pada pertengahan April, **perundingan antara Timor Lorosa'e/ UNTAET dan Indonesia gagal membangun jalur transportasi darat dari kantong Oe-cusse ke Dili karena gangguan dari Jakarta.** Komandan TNI Kolonel Moeswarno Moesanip mengatakan bahwa militer menolak usulan UNTAET karena TNI tidak dapat menjamin keamanan warga Timor Lorosa'e yang melakukan perjalanan karena keberadaan milisi pro-integrasi di wilayah Kefamenanu dan Atambua di Timor Barat. Selain itu, layanan ferry yang telah lama dijanjikan antara wilayah kantong dan daerah lain Timor Lorosa'e belum dimulai, dan layanan penerbangan terbatas yang disediakan UNTAET akan berakhir pada 20 Mei.

Pada tanggal 22 April, **Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan yang sangat lemah berkenaan dengan tindakan Indonesia terhadap Timor Lorosa'e.** Menahan diri tidak mengkritik Jakarta, pernyataan Ketua Komisi, "menyambut langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membawa ke pengadilan para pelaku kasus-kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Lorosa'e dalam jangka waktu sebelum dan sepanjang konsultasi rakyat di Timor Lorosa'e pada bulan Agustus 1999." Menurut Amnesty Internasional, resolusi tersebut, "tidak akan menempatkan penguasa Indonesia di bawah tekanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa keadilan diberikan atau semua yang diduga sebagai pelaku, termasuk penanggungjawab komando diajukan ke pengadilan." East Timor Action Network/US dari Amerika Serikat menganggap pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia itu sebagai "hadiah ulangtahun yang buruk bagi bangsa yang akan segera merdeka" dan menganggap "pada dasarnya meninggalkan kepura-puraan bahwa mereka yang paling bertanggungjawab terhadap kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang terjadi di Timor Lorosa'e seharusnya diajukan ke pengadilan." Dalam laporannya ke Komisi, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Mary Robinson mengkritik dengan tajam proses pengadilan di Indonesia dan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk "mempertimbangkan kembali rekomendasi-rekomendasi Komisi Penyelidik Internasional [Perserikatan Bangsa-Bangsa] untuk Timor Lorosa'e, termasuk mengenai pembentukan pengadilan internasional hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Pada tanggal 22 April **Fernanda Borges, Menteri Keuangan pada Pemerintah Transisi Kedua Timor Lorosa'e mengundurkan diri.** Ia menjelaskan pengunduran dirinya, "semata-mata didasari atas kegagalan pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, kurangnya transparansi dalam pengembangan kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang berpusat pada perseorangan di dalam pemerintah." Sebelum mengundurkan diri, Borges melengkapi anggaran pemerintah baru yang ia gambarkan sebagai "disasarkan secara

realistis pada sektor-sektor kunci yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, yakni pertanian, pendidikan, dan kesehatan.” Tetapi ia memperingatkan bahwa “keberhasilan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan program tergantung pada komitmen dan kemauan setiap Menteri dan Dewan Menteri untuk membuat rancangan pemerintahan yang dibutuhkan untuk pertanggungjawaban yang sebenarnya.” Borges, yang tidak berafiliasi pada suatu partai politik, digantikan oleh Maria Madalena Brites Boavista, seorang anggota partai FRETILIN sejak 1974 yang bekerja pada masalah minyak Celah Timor.

**Pada tanggal 25 April sebuah penelitian dari UNICEF (Dana Anak-anak PBB) melaporkan bahwa penyiksaan terhadap**

**anak dan eksploitasi seksual komersial anak-anak merupakan masalah yang sedang muncul di Timor Lorosa’e.** UNICEF menyerukan tanggapan yang terpadu dari para pemimpin masyarakat sipil dan penegakan hukum untuk memerangi masalah tersebut. Program untuk Pembangunan dan Pemulihan Psikososial (PRADET) mendokumentasikan 103 kasus penganiayaan anak selama jangka waktu satu bulan hanya di 5 dari 13 distrik di Timor Lorosa’e. Enam puluh persen dari kasus-kasus tersebut meliputi penyerangan seksual terhadap anak, kekerasan fisik atau eksploitasi seksual komersial. Delapan puluh lima persen dari korban penyerangan seksual adalah anak perempuan, yang mayoritas pelakunya adalah laki-laki muda anggota keluarga, atau laki-laki muda yang dikenal korban. ❖

---

## Editorial: Kemerdekaan Keuangan *(Dari halaman 20)*

Ketika Bank Dunia dan lembaga mitranya, Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund), mempengaruhi strategi pembangunan negara-negara lain melalui dana anggaran yang sama, yang dinamakan Kebijakan Strategi Pengurangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP), atau cara-cara yang lain, prosesnya seringkali merugikan mayoritas rakyat. Bukannya memperbaiki kondisi rakyat miskin, kebijakan Bank Dunia malah menguntungkan perusahaan-perusahaan transnational, para investor, dan bank-bank yang berbasis di negara-negara kaya. PRSP adalah kelanjutan Program Penyesuaian Struktural (SAP, Structural Adjustment Programs) yang memperburuk krisis ekonomi di banyak negara. Tuntutan dari IMF dan Bank Dunia berperan penting dalam krisis keuangan yang menghancurkan Indonesia (dan Timor Lorosa’e). Inisiatif Pengkajian Ulang Program Penyesuaian Struktural, sebuah penelitian luas terhadap program-program itu telah dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil dan Bank Dunia sendiri, menemukan bahwa SAP tidak hanya gagal untuk memberikan manfaat kepada rakyat negara-negara yang menjalankannya, tetapi justru sebenarnya meningkatkan kemiskinan. Meskipun Bank Dunia berpartisipasi dalam merumuskan garis besar metodologi dan pelaksanaan penelitian ini, Bank Dunia tidak menyukai hasil penelitian ini dan secara resmi mundur dari proyek penelitian ini sebelum ringkasan pendahuluannya diterbitkan pada akhir November lalu.

Karena Timor Lorosa’e tidak mempunyai pemerintah yang merdeka selama masa transisi, negara ini tidak berhak atas pinjaman luar negeri. Dana bantuan hibah diberikan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pembangunan. Tetapi, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF jarang memberikan bantuan hibah kepada negara-negara yang merdeka, sebaliknya mendorong mereka untuk meminjam uang dari lembaga-lembaga keuangan. Program-program seperti PSRP memaksa banyak pemerintah untuk memprioritaskan pembayaran pinjaman mereka dibandingkan memberikan pelayanan sosial dasar yang memadai, atau malah sama sekali menghapuskan pelayanan sosial itu.

Para pemimpin Timor Lorosa’e berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak mau meminjam uang dari Bank Dunia atau sumber-sumber lainnya, dan kita setuju bahwa negara yang baru ini tidak boleh memulai dengan beban pinjaman luar negeri.

Bagaimanapun, terdapat banyak kekhawatiran bahwa Bank Dunia akan menggunakan kontrolnya atas fasilitas pengelolaan untuk memaksa pemerintah Timor Lorosa’e berhutang kepada

Bank Dunia. Tetapi tanpa hutang sekalipun, Bank Dunia akan besar pengaruhnya jika mereka mengontrol fasilitas itu. Pemerintah Timor Lorosa’e berhak untuk khawatir terhadap Bank Dunia dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, dan membatasi keterlibatan dengan badan-badan seperti itu adalah strategi yang terbaik untuk mencegah kerusakan yang dilakukan oleh badan-badan ini terhadap rakyat di banyak negara lain.

Timor Lorosa’e akhirnya akan mencapai kemerdekaannya — kemerdekaan ini tidak boleh dikompromikan dengan kontrol atau pengaruh dari luar yang melampaui batas terhadap anggaran pemerintah. Kami setuju dengan pejabat-pejabat Timor Lorosa’e, donor-donor, dan lembaga keuangan internasional bahwa korupsi dan salah urus harus diusahakan pada tingkat yang sangat rendah, dan bahwa pemantauan dan pencegahan seharusnya diterapkan untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dan sumbangan donor digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Bagaimanapun, seperti di negara-negara lain, pemerintah baru akan melakukan kesalahan. Sebagai negara merdeka, Timor Lorosa’e seharusnya diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahannya, bukannya dihukum karena kesalahan itu. Pembangunan kapasitas makro seperti itu tidak sejalan dengan pola ketat Bank Dunia yang secara tidak langsung atau terbuka mengancam menahan dana dari donor-donor jika Timor Lorosa’e melaksanakan program-program yang tidak disukai oleh Bank Dunia.

Selama dua tahun terakhir, masyarakat internasional telah berbaik hari mendukung proyek-proyek yang dikelola internasional di Timor Lorosa’e. Sekarang adalah waktunya untuk membantu rakyat Timor Lorosa’e melanjutkan tugas-tugas ini, dan mengambil tantangan yang banyak dan khas yang diberikan sejarah negara ini. Masyarakat internasional bertanggungjawab untuk menjamin bahwa pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk beroperasi, terutama karena keterlibatan dan pengingkaran internasional memberikan peluang terjadinya tragedi-tragedi yang telah memporak-porandakan negara ini. Kontribusi dibutuhkan untuk menutup kekurangan anggaran akan menjadi pengakuan simbolik dari pemerintah-pemerintah yang duduk di Dewan Keamanan PBB, para tetangga Timor Lorosa’e, dan bekas penjajah dan penguasa militer di Timor Lorosa’e yang akan dinilai sebagai reparasi dalam sebuah tatanan internasional yang adil. ❖

Setelah perjuangan selama berabad-abad, akhirnya Timor Lorosa'e akan menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Tetapi kemerdekaan seperti apa jika kekuatan-kekuatan luar telah mengontrol sepertiga keuangan negara? Timor Lorosa'e sedang dipaksa untuk menerima sebuah sistem yang akan memberikan kekuatan kepada Bank Dunia untuk memanipulasi kebijakan pemerintah baru.

Selama pemerintahan transisi, UNTAET mengelola Dana Gabungan untuk Timor Lorosae (CFET, Consolidated Fund for East Timor), yang menggabungkan kontribusi para donor dan pendapatan pemerintah untuk membiayai calon pemerintah nasional (ETTA/ETPA). Tetapi CFET tidak lagi ada pada saat kemerdekaan, dan negara-negara donor meminta sebuah fasilitas keuangan baru, sebuah mekanisme untuk menggabungkan dan mengkoordinasikan sumbangan mereka.

Kebanyakan pemerintah pemberi dana enggan memberikan dukungan fiskal secara langsung kepada pemerintah Timor Lorosa'e. Sebaliknya, mereka lebih menyukai sebuah fasilitas yang dikontrol internasional untuk mengumpulkan kontribusi mereka dan secara berkala mengeluarkan dana bagi pemerintah baru. Bank Dunia akan mengontrol dana yang diusulkan. Pejabat-pejabat pemerintah Timor Lorosa'e enggan untuk menerima struktur ini, dan meminta PBB untuk mengelola dana tersebut — pada pokoknya, melanjutkan perannya sekarang ini sebagai pelaksana CFET. Sayangnya, PBB telah menolak, dan para donor tidak nyaman dengan manager manapun selain Bank Dunia.

Pemerintah baru telah menghadapi sejumlah tantangan: meskipun milyaran dollar telah diberikan kepada UNTAET, lembaga-lembaga multilateral, dan organisasi non-pemerintah internasional, negara ini belum pulih dari 24 tahun pendudukan Indonesia, yang diakhiri oleh kekerasan militer dan milisi pada tahun 1999. Rencana pemerintah sangat sederhana, tetapi dalam kondisi ekonomi yang berantakan, pemerintah tidak dapat memperoleh pendapatan pajak yang cukup untuk menutup anggaran yang jumlahnya kecil sekalipun. Pemerintah memperkirakan total pendapatan sedikit lebih dari \$40 juta untuk tahun anggaran 2002-2003, dan sekitar \$5 juta tersisa dari CFET, tidak cukup untuk menutup anggaran yang besarnya \$77 juta. Pemerintah meminta kepada para donor untuk menutup kekurangan \$30 juta, dan tambahan \$60 juta untuk anggaran 2003-2005. Setelah itu, pemerintah berharap pendapatan dari minyak dan gas untuk menutup kesenjangan pendapatan. Kekurangan anggaran ini telah dikurangi secara drastis sejak Konferensi Donor di Oslo bulan Desember 2001, dengan pemerintah meningkatkan perkiraan pendapatan lebih dari \$5 juta dan memotong \$20 juta dalam rencana pengeluaran.

Pada dua tahun terakhir, Bank Dunia telah mengelola TFET (Trust Fund for East Timor, Anggaran Perwalian untuk Timor Lorosa'e), yang sekitar \$150 juga didapatkan dan dikeluarkan untuk proyek-proyek khusus yang dikontrol oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Fasilitas keuangan baru yang diusulkan itu berbeda, dalam hal ini pemerintah akan mengelola pengeluaran, bukan Bank Dunia. Meskipun demikian, proyek-proyek Bank Dunia sebelumnya di Timor Lorosa'e dan catatan mereka di negara-negara lain menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

*La'o Hamutuk* telah menginvestigasi beberapa proyek Bank Dunia di Timor Lorosa'e, dan menemukan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan. Emergency School Readiness Program (Program Kesiapan Sekolah Darurat) menggunakan jasa dari luar yang mahal padahal tersedia alternatif lokal. Dengan demikian, keuntungan mengalir ke perusahaan-perusahaan asing bukannya menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kemampuan lokal (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 2, No. 4). Proyek-proyek pertanian Bank Dunia didasarkan pada ide "pasar bebas" yang berisiko merugikan rakyat yang seharusnya mereka tolong (lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol 1, No. 4 dan Vol 3, No. 1). Lainnya, seperti Community Empowerment Program (CEP, Program Pemberdayaan Masyarakat) sangat jelek dalam berhubungan dengan struktur-struktur masyarakat dan politik lokal, malah sebaliknya memaksakan proses dan agenda mereka sendiri.

*(Bersambung ke alaman 19)*

### Apa itu La'o Hamutuk?

*La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e–Internasional yang memantau, menganalisa dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa masyarakat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses merekonstruksi atau pembangunan dan proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e yang efektif dalam merekonstruksi dan membangun negara ini. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk memperbaiki komunikasi antara komunitas internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik staf lokal maupun internasional mempunyai tanggung jawab yang sama dan memperoleh gaji dan keuntungan yang sama. Akhirnya, *La'o Hamutuk* menjadi pusat informasi dengan menyediakan berbagai bacaan tentang model pembangunan, pengalaman dan hasil praktek dan juga memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model pembangunan alternatif.

*Dengan dorongan semangat transparansi yang kuat, La'o Hamutuk mengharapkan anda untuk menghubungi kami jika anda mempunyai naskah-naskah dan atau informasi yang harus dibawakan pada perhatian masyarakat Timor Lorosa'e dan juga masyarakat internasional.*